



Cikudapapers

Desember 2017

Vol.5

Materi dalam edisi ini di dedikasikan untuk semua rakyat yang sedang berjuang mendapatkan hak ruang hidupnya kembali dari ancaman bedil di kampung baru Dadap, Tanggerang, pembangunan bandara di Kulon Progo, pabrik semen di kendeng, penggusuran di kampung-kampung kota Bandung dari Kebon Jeruk, Taman Sari sampai Dago elos, hingga perampasan ruang hidup di Papua yang mengatasnamakan kedaulatan Pangan, juga di seluruh titik perlawanan dalam peta konflik di wilayah Indonesia.

Dengan memuat empat materi yang bersinggungan dengan penggusuran dan perampasan lahan hidup, edisi ini adalah ungkapan paling sederhana yang dapat kami lakukan untuk menjawab seruan panggilan solidaritas yang bermunculan selama tahun 2017.

Dua materi diambil dari pengalaman rakyat belahan dunia lainnya yang mengalami desakan serupa yang dialami rakyat di Indonesia, mengkisahkan relevansi antara urbanisasi dengan kebutuhan kapitalis global untuk mengakumulasi modalnya.

Dua materi lainnya di sunting dari kegelisahan aktivis intelektual muda yang radikal, mengabarkan kondisi di lapangan, penting untuk di sunting karena beberapa kaum intelektual ini, khususnya kaum muda, memilih jalan yang berdebu, panas, dan berkeringat di dalam barisan rakyat yang sedang melawan penggusuran ketimbang duduk nyaman di ruang-ruang seminar, kelas dan kantor yang nyaman seraya mengamini penggusuran dan perampasan demi kepentingan nasional.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan edisi ini.

Panjang Umur solidaritas!
Hidup Rakyat Yang Melawan!

Bandung, 30 Desember 2017

“Terinjak di Kampung kota”

oleh: Individu Bebas

USIR ^{SITAN}
TANAH

PEJUNGENYIM

DA60

Aku tak pernah dapat memahami pilu yang di rasakan manusia-manusia di kota ini maupun kota-kota lain di dunia. Mengapa banyak pria dan wanita yang menangis tersedu-sedu di gubuk-gubuk. Ada pula anak kecil yang tersenyum palsu di perempatan jalan-jalan bersih nan indah dengan banyak bangunan menjulang tinggi di sisi kanan kirinya?

Dan lebih jauh lagi, ingin aku mengetahui siapa pula dalang dari semua ketimpangan yang membuat teman-teman, orang-orang tua itu pusing? Sudah lama aku merenungkan masalah ini seperti filsuf plato merenungkan bentuk negara. Tapi tak mampu aku tuliskan ke atas kertas atau sekedar mencoret-coret tembok di bawah jembatan layang seperti biasa aku lakukan di masa remaja dulu. Biasanya setiap kejadian yang menyentuh, selalu aku rasakan. Kemudian dengan sendirinya tangan ini bergerak lihai, layaknya penari balerina di gedung teater megah di tengah kota. Tangan ini bergerak, mengabadikan. Karena selalu terpatrit dalam pikiran, kata kata adalah senjata. Kata-kata dapat merubah dunia, dan panggung sejarah hanya terjadi sekali. Namun untuk masalah ini, baru kali ini aku berani untuk mengabadikan.

Aku tutup catatan harianku, lalu kusimpan kembali ke dalam tas. Di bawah rindang pohon, aku duduk sembari membaca buku yang aku pinjam dari seorang kawan. Sambil sesekali mencatat segala yang dirasa perlu. Di sebelah timur tempat aku duduk, terlihat suasana yang lenggang, sepi sekali, tak seperti biasanya. Aku bergumam pada angin “Lama kelamaan kota ini menjadi sepi sunyi”. Mati. “Langit biru yang cerah” pikirku. Aku dapat melihatnya dari celah rimbun daun. Membosankan. Di sebelah timur masih terlihat, berdiri tegak pohon lain yang tak kalah rimbun. Daun pohon itu hendak berguguran, tapi masih malu-malu, atau mungkin mereka ragu-ragu untuk jatuh ke atas tanah. Karena di bawah lebat daunnya, ada beberapa pria tua sedang asyik bermain kartu remi. Tanpa rokok, tanpa kopi.

Selang beberapa saat, muncul pria tua dengan kretek menempel di bibir keriputnya. Di belakang pria tua itu terlihat seorang pria berjalan tergoop-gopoh. Dia mengenakan topi caping dan kaos belel

yang sepertinya tidak dia ganti berminggu-minggu. Pria-pria itu membawa beberapa cangkir kopi. Dari sini terlihat, air muka mereka yang jelas kelelahan, bahkan pria tua yang membawa dua cangkir kopi, wajahnya memerah. Kota ini berangsur-angsur berubah. Sudah tak terhitung lagi banyaknya bangunan-bangunan tinggi menjulang yang menembus menantang angin dan langit di atasnya. Taman ini, taman terakhir yang tersisa di kota. Tak banyak pula orang yang membunuh waktu di tempat terpencil seperti ini. Taman ini telah tergerus kharismanya oleh bangunan di sisi kiri dan kanannya; Supermarket, Bioskop, Kafetaria, dan Restoran-restoran megah nan mewah.

Terdengar suara riuh, orang-orang tua itu bermain kartu dengan teriakan dan gelak tawa, mereka senang sekarang. “Kebahagiaan yang sederhana “ kataku dalam hati. Hanya karena ada beberapa cangkir kopi dan masing-masing jari mereka mengapit sigaret, taman berubah suasana. Menyenangkan.

Nyalak seekor anjing menyita perhatianku dari buku, aku melihat seorang wanita yang membawa anjing berjalan-jalan di sekitar taman. Dengan potongan baju mewah dan topi modis menempel di kepalanya, ia menggenggam kuat tali pengikat anjing kecil miliknya. Aku tersenyum pada wanita muda itu, ia acuh tak acuh. Melihat gelagatnya yang seperti itu, kutundukan kembali kepalaku pada sebuah selebaran lusuh diatas tanah.

Sedikit mencuri-curi pandang, kulihat anjing itu sekarang kencing di rumput hijau tepat beberapa meter dari hadapanku. Aku jadi naik pitam. Aku berdiri karena merasa di hina, aku dikencingi seekor anjing. Wanita itu tertawa kecil sambil melihat ke arahku dan mulai mengikuti anjing kecil itu berjalan ke depan. Aku berjalan cepat dan memegang pundak wanita itu, ia berdiri mematung, dan anjing kecilnya tidak mau diam. Sedetik kemudian, aku tendang kepala anjing sialan itu sekuat yang aku bisa.

Wanita itu tak kepalang marah besar. Terlihat dari mukanya yang memerah, menahan amarah. Matanya memburu, mulutnya memaki dengan seluruh kosa kata yang ia punya. Terdengar jelas kata kotor keluar, dari setiap kinclong putih giginya. Namun, tak aku hiraukan.

“Anjing ini lebih mahal dari harga dirimu!”

“Dasar manusia miskin kota! Lebih baik kalian mati saja dan jangan pernah tinggal di kota ini!”

Aku hanya melengos pergi. Terakhir yang kulihat, hanya wajahnya yang memerah dan jari telunjuk yang tak pernah turun.

“Kulaporkan kau ke polisi, biar tau rasa!”

“Miskin dan belagu!”

Ia terus menyerocos, mengeluarkan setiap kata kotor yang terbesit dalam pikirannya, tapi aku. Aku menganggapnya sebagai angin lalu yang tak berarti.

Seusai melaksanakan kewajiban shalat Dzuhur berjamaah di masjid, aku mencari tempat untuk menyendiri, tempat itu mesti sejuk dan teduh. Sebagai orang yang terlahir dan besar di kota ini, aku tak pernah tahan terhadap panas, karena sekian tahun yang lalu kota ini berbeda. Dan sialnya, sekarang kota ini membakar penduduknya.

Akhirnya aku menemukan tempat yang aku cari, tepat berada di pojokan masjid. Setelah semua jemaah keluar, aku mulai membuka tas gendongku yang besar, barang yang menyimpan segala harta benda miliku. Kemudian aku mengeluarkan sebuah jurnal. Sebelum memulai membaca jurnal tipis itu, aku merenungkan kehidupan. Kehidupan yang tidak pernah bebas, yang selalu di dominasi orang lain, yang dengan kekuatannya ia dapat mudahnya melempar-lempar nasib seorang manusia layaknya melempar bangkai tikus.

Aku teringat kembali ketika kota ini masih menjadi kota yang ramah, kota yang memiliki arti bagi setiap orang yang pernah bermalam bersamanya, ketika masih banyak manusia-manusia yang tersenyum dan saling tegur sapa, masih banyak pemuda-pemudi penuh gairah yang melibatkan diri dalam banyak kegiatan kesenian. Ketika tidak ada tentara yang turun kejalanan atau ketika dimana tidak pernah terdengar ada berita bunuh diri karena permasalahan perut.

Ketika aku berumur 18 tahun, aku dan keluarga bersemayam di gubuk kecil di sebuah kampung. Orang-orang diluar kampung memberi julukan Kampung Debu, tapi tak pernah aku tahu apa maksudnya. Saat itu aku menikmati hidup, sama seperti setiap manusia yang bernaung di kampung kecil itu. Sampai suatu hari kami diundang oleh pemerintah untuk menghadiri sebuah acara peringatan hari jadi kota.

Bukan kepalang kami semua berbahagia, suasana berubah. Anak-anak kecil semakin rajin membicarakan kebaikan hati Walikota, pengayuh becak yang kemudian menjadi peduli pada permasalahan kampung dan ibu-ibu yang semakin giat bersolek. Itu semua terjadi karena hanya kampung kamilah yang diberi kesempatan membicarakan perayaan hari jadi kota. Aku sudah banyak bertanya pada teman di kampung-kampung lain, dan mereka hanya menggeleng. Mereka tidak pernah mendapat kesempatan sebesar ini.

Awan putih bergerak perlahan, tertiuip angin. Nyanyian burung kenari yang entah darimana datangnya menyambut setiap semangat manusia-manusia yang berjalan perlahan ke arah lapangan. Aku melihat semua warga di kampung bersiap berangkat ke Balai kota untuk bertemu dengan Walikota. Ayam-ayam peliharaan masih terlihat berada di dalam kadangnya masing-masing, tak jarang mereka berkokok. Untuk hari ini, tak seperti biasanya, tak ada teriakan ibu kepada anaknya, tak ada suara ribut motor butut, tak ada suara derap langkah kaki para buruh pabrik. Aktifitas di kampung akan berhenti total, bahkan seorang pemulung, berhenti mencari penghidupan untuk hari ini. Dia terlihat mengenakan pakaian terbaiknya, kemeja putih belel dengan corak garis-garis. Sedangkan aku sendiri, merasa percaya diri. Aku berusaha berpenampilan sopan dan menarik musabab aku akan berbicara di hadapan Walikota. Kami di sambut oleh beberapa petugas dan Wartawan yang sibuk memotret kehadiran kami di Balai kota. Aku semakin bangga, dada ini seperti menggelembung bahkan hendak pecah. Itu karena aku berjalan di barisan paling pertama, bersama dengan ayah, ketua Rukun Warga dan beberapa jajaran Rukun Tetangga yang tersenyum riang menghadap kamera-kamera Wartawan.

Masih di ikuti lensa kamera Wartawan, kami dipersilahkan masuk ke

dalam gedung megah tersebut. Gedung dengan gaya khas belanda, bercat putih dengan lantai-lantai yang bersih. Suara-suara sepatu berdecit terdengar seiring alas kaki itu bersenggama dengan lantai tersebut. Lima belas menit kemudian Walikota datang, memberi sambutan dengan sikap ramah serta kehangatannya. Aku semakin mengagumi sosoknya. Kami dipersilahkan menikmati hidangan yang sudah di persiapkan sebelumnya, kemudian aku mulai memberikan sambutan dan puji-pujian untuk orang yang telah mengundang kami kemari, begitupun Ayah. Aku tersenyum mantap. Walikota menjabat tanganku dengan erat.

Jamuan makan itu telah selesai, salah seorang Pria yang mengaku sebagai sekretaris daerah mulai berbicara. Dan suasana riang gembira seketika berubah menjadi suasana yang mencekam. Kulihat wajah ayahku memerah, warga lainnya kebingungan, begitupun aku. Hanya ayahku yang berbicara dengan nada keras dan marah. Aku bingung . Bahkan karena amarah yang tak dapat dibendung, ayahku pergi pulang sendirian.

Gemerik air hujan menghantam-hantam atap rumah. Di dalam rumah, ayahku tak henti-hentinya menghantam pikiranku dengan kata-katanya. Ia meyakinkanku agar tetap waspada dan kuat. Bahkan ia bicara agar melawan segala bentuk intimidasi yang mungkin akan datang. Aku dengan sungguh-sungguh menyimak.

“Kita harus jadi batu nak, batu itu walaupun diam, mereka keras. Batu itu seperti kita, tak berharga. Tapi ingat, batu dapat melukai ketika dilemparkan, karena mereka keras”.

“ Ingat nak, karena batu itu keras”.

“Anjing!”

“Ngapain tentara ikut-ikutan? Brengsek!”

“Kami punya bukti, enyah kalian!”

“Melayani dan mengayomi siapa? Bajingan!!”

Sinar matahari yang terik, menjadi saksi riuh rendah suara teriakan warga, mereka menggenggam senjata masing-masing, stik bisbol, parang, arit, katana, balok kayu. Paling minimal mereka menggenggam batu kerikil. Di satu sisi, warga kampung berteriak sambil mengacungkan senjata-senjata mereka. Bersiap hendak berperang, bersiap menyambut izrail. Pemuda-pemuda melemparkan banyak batu-batu yang mereka genggam. Pada sisi lain, Polisi dan Satpol PP memamerkan rotan dan tameng mereka. Aku dan ayah serta ibu-ibu berubah menjadi seonggok batu besar yang diam. Duduk bersila, menunduk dan sesekali menghisap rokok. Gerombolan Polisi dan Satpol PP kian mendekat dan aku tetap teguh memilih menjadi batu, meski batok di pukuli rotan, wajah ditampar tameng dan kepala diinjak sepatu lars. Dengan kepayahan aku bangkit dan menghadang mereka kembali, tetap menjadi batu. Terus menerus, berulang-ulang.

Pada satu malam yang dingin, di bawah sinar rembulan yang elok nan indah, bintang menjadi saksi saat aku ditangkap pihak kepolisian. Tanganku di borgol dan diseret masuk ke dalam mobil hitam di seberang jalan. Aku di tangkap dengan tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Aku mendekam di hotel prodeo selama tiga bulan, si penjaga terkikih sambil memberiku gelar tapol. Gelar yang aku tak tahu apa maksudnya. Di dalam penjara aku mendengar kampung kelahiranku kini sudah tidak ada, Ayah dan Ibu pindah ke pinggiran kota. Mereka bercerita penuh dengan kesedihan dan isak tangis, terutama Ibu. Terdengar juga kabar, banyak undangan-undangan untuk kampung-kampung yang lain.

Ingatan itu membuat kepala kecil ini berdenyut-denyut. Kemudian aku buka kembali catatan miliku, baris-baris pertanyaan masih terpampang dan belum terjawab. Lalu, aku teguh memilih menjawab semua pertanyaan yang tertulis di atas kertas itu. Dengan langkah awal membaca sebuah jurnal. Jurnal tipis dengan kertas berwarna kekuningan yang berjudul “*Right Of The City*”.



Hak Atas Kota
oleh:David Harvey



Kita hidup dalam sebuah era dimana gagasan hak-hak dasar manusia telah bergerak maju ketengah-tengah pusat perhatian umat manusia baik secara politis maupun secara etis, sudah begitu banyak energi politik yang di keluarkan dalam rangka mempromosikan, melindungi dan mengartikulasikan gagasan tersebut dalam rangka membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, sebagian besar gagasan tersebut memang lebih terkesan berorientasi pada pemenuhan hak-hak individualistik dan kepemilikan pribadi, serta tidak pernah berusaha untuk melawan hegemoni Liberalisme beserta logika pasar Neoliberal atas modus legalitasnya hingga tindakan represif yang sering dilakukan oleh negara. Bagaimanapun juga, kita hidup dalam sebuah dunia dimana hak atas kepemilikan pribadi beserta tingkat keuntungan telah berhasil mengesampingkan hak-hak dasar manusia yang lainnya, tapi tentunya masih ada peluang bagi perjuangan-perjuangan pemenuhan hak dasar manusia yang secara bersama-sama terlibat dalam satu front perjuangan sosial dengan bentuk kolektif, seperti halnya ketika hak-hak buruh, perempuan, kaum LGBT dan

kelompok minoritas bersatu dalam satu barisan perjuangan (hal tersebut merupakan hasil dari sejarah panjang gerakan buruh di Amerika Serikat, contohnya ketika gerakan hak sipil yang terjadi pada tahun 1960an yang mana bukan saja front perjuangan itu bersifat kolektif, namun juga telah berhasil menggema keseluruh dunia). Perjuangan sosial atas hak-hak yang bersifat kolektif punya kesempatan yang lebih besar untuk menghasilkan mencapai tujuannya.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengeksplorasi bentuk lain dari hak-hak kolektif —yang mana dalam konteks ini adalah hak atas kota dalam rangka menghidupkan kembali gagasan-gagasan Henri Lefebvre dan juga merespons atas kemunculan beberapa gerakan sosial perkotaan di seluruh dunia. Kemudian, bagaimana kita menggunakan hak (ed.Hak atas kota) tersebut?

Kota dalam catatan sosiologis-urban Robert Park adalah “usaha paling sukses yang pernah dilakukan oleh umat manusia pembuatan-ulang (*remake*) dunia yang dia hidupi melebihi hasrat dalam hatinya”, tapi jika kota adalah dunia yang dibuat oleh manusia, maka manusia telah di kutuk (*condemned*)

untuk hidup di dalamnya. Jadi secara tidak langsung serta tanpa adanya kejelasan mengenai tugasnya di muka bumi, ketika manusia membuat sebuah kota sesungguhnya dia telah menciptakan-ulang (*remade*) dirinya sendiri.[1] Dan jika Robert Park benar soal ini, lantas kemudian pertanyaan mengenai kota yang seperti apa yang kita hendaki tidak bisa di pisahkan dari pertanyaan mengenai masyarakat yang seperti apa yang kita hendaki, relasi-sosial seperti apa yang kita hendaki, bentuk relasi kita dengan alam yang seperti bagaimanakah yang kita hendaki, jalan hidup seperti apa yang kita ingin jalani, serta nilai-nilai estetika seperti apa yang kita pegang. Maka dari itu hak atas kota bukan hanya persoalan pemenuhan hak-hak individu atau segelintir kelompok dalam rangka mengakses sumber daya yang terkandung dalam kota: hak atas kota adalah hak untuk merubah (*change*) dan merubah-ulang (*reinvent*) kota melampaui hasrat dalam hati kita. Hak atas kota lebih bersifat pada sebuah hak kolektif ketimbang sebagai hak individu, hal ini dikarenakan ketika merubah sebuah kota, kekuatan kolektif sangat di butuhkan dalam mempengaruhi sebuah proses urbanisasi. Kebebasan dalam membuat dan

membuat-ulang diri kita beserta kota kita sendiri adalah salah satu hal yang sangat berharga namun sering kali kita abaikan pada setiap konsep hak-hak dasar manusia yang kita miliki. Kemudian apa cara terbaik dalam menggunakan hak tersebut?

Sebagaimana penegasan Robert Park, sejak kita tidak memiliki tujuan yang jelas mengenai peran kita di dunia ini, maka adalah sebuah hal yang sangat berguna bagi kita untuk merefleksikan diri kita pada bagaimana kita telah membuat dan membuat-ulang proses-urban yang didorong oleh desakan-desakan kekuatan sosial yang sangat besar. Kecepatan dan skala yang sangat luar biasa dari urbanisasi selama seratus tahun terakhir adalah tanda bahwa kita telah membuat-ulang baik diri kita maupun kota-kota kita berkali-kali tanpa tahu mengapa dan bagaimana melakukan hal tersebut. Apakah proses urbanisasi yang sangat dramatis ini ikut berkontribusi terhadap kehidupan umat manusia hari ini dan hari-hari sebelumnya? Apakah hal tersebut telah membuat kita menjadi manusia yang lebih baik? Ataukah urbanisasi telah membuat kita terperosok ke dalam zaman jahilliyah (*anomie*) yang penuh

dengan alienisasi (ed. Keterasingan), kemarahan dan kefrustrasian? Apakah kita telah menjadi sebuah *monad* yang terombang-ambing di lautan perkotaan? Semua pertanyaan inilah yang senantiasa menghantui para komentator sosial abad 21 seperti misalnya, F. Engels dan Georg Simmel; yang telah menawarkan beberapa kritik dalam memandang persona urban yang kemudian muncul dalam merespon cepatnya laju urbanisasi yang terjadi dewasa ini.[2] Hari ini tidaklah sulit untuk menghitung semua bentuk kegelisahan yang pada saat bersamaan kegembiraan yang ditimbulkan oleh urbanisasi ditengah-tengah cepatnya laju transformasi perkotaan. Namun entah bagaimana kita selalu kehilangan keberanian untuk melancarkan kritik secara sistematis atas proses ini, cepatnya gelombang perubahan (ed. secara teknologi, sosial politik dan budaya) telah membuat kita kewalahan sebagai contohnya, apa yang mesti kita perbuat ketika penumpukan kekayaan dan meningkatnya konsumerisme yang terjadi hampir diseluruh kota di dunia ini tepat ditengah-tengah, mengambil istilah dari Perserikat Bangsa-Bangsa, ledakan “planet kumuh (*planet of slum*).”[3]

Untuk merebut hak atas kota dalam hal ini saya maksudkan sebagai perebutan sebuah bentuk kekuatan dalam rangka merubah bentuk dan mempengaruhi proses urbanisasi, melalui jalan yang sama dalam membuat dan membuat-ulang kota secara fundamental dan radikal. Pada mulanya kota-kota dibangun melalui konsentrasi geografis dan sosial atas surplus-produksi. Maka dari itu lah urbanisasi selalu dan merupakan sebuah fenomena kelas, karena surplus-produksi tersebut telah di ekstrasi dari suatu tempat dan dari seseorang, sementara itu kontrol atas penggunaa surplus tersebut selalu berada di tangan segelintir orang (oligarki-religius, atau orang-orang yang berpengaruh secara politik, dan ekonomi dengan ambisi imperialismenya). Situasi umum ini bertahan di bawah sistem ekonomi Kapitalisme, tentu saja, namun dalam kasus ini dinamika yang terjadi sedikit berbeda. Kapitalisme bersandar pada, seperti yang pernah di katakan Marx pada kita, kebutuhan untuk mencari nilai-lebih (ed. Keuntungan) namun untuk dapat memperoleh nilai-lebih tersebut, pertama-tama si kapitalis harus memproduksi surplus-produksi. Ini berarti kapitalis akan terus menerus memproduksi surplus-produksi

yang mana surplus-produksi ini dibutuhkan oleh urbanisasi, Juga sebaliknya, kapitalisme membutuhkan urbanisasi untuk menyerap surplus-produksi yang mana surplus-produksi secara terus-menerus di produksi oleh kapitalisme. (ed. Hasil akhir dari penyerapan surplus-produksi adalah nilai-lebih yang di butuhkan bagi bertahannya sistem kapitalisme, singkatnya kapitalisme tidak bisa menemukan nilai-lebih tanpa adanya bantuan dari pihak lain). Melalui relasi ini muncul lah sebuah hubungan yang mesra diantara sistem kapitalisme dan urbanisasi, maka dari itu tidaklah mengejutkan apabila pertumbuhan kurva logistik kapitalisme (ed. Uang, komoditi, tenaga kerja) dari waktu ke waktu bergerak berbanding lurus (*parralel*) dengan kurva logistik urbanisasi dari seluruh populasi di dunia ini.

Mari kira lihat apa yang di kerjakan kapitalisme secara lebih dekat. Mereka memulai harinya dengan beberapa uang dan pada malam hari mereka mendapatkan lebih banyak uang (kelebihan uang tersebut disebut dengan keuntungan). Pada hari berikutnya mereka harus memutuskan apa yang harus mereka lakukan dengan kelebihan uang itu (*surplus*

money) yang mereka peroleh pada kemarin malam. Mereka menghadapi sebuah dilemma Faustian: menginvestasikan kembali untuk memperoleh lebih banyak uang atau membelanjakan uang tersebut untuk bersenang-senang. Hukum persaingan yang keras memaksa mereka untuk menginvestasikan-ulang uang tersebut, karena jika mereka tidak melakukan hal tersebut orang lain pasti akan melakukannya. Untuk membuat Kapitalis menjadi Kapitalis, surplus yang mereka produksi harus kembali di investasikan dalam rangka memperoleh lebih banyak keuntungan. Kapitalis yang sukses biasanya tidak akan hanya menginvestasikan ulang surplus tersebut dalam rangka ekspansi bisnisnya, namun juga membelanjakan surplus tersebut untuk memenuhi hasratnya yang tamak. Tapi hasil akhir dari investasi-ulang yang di lakukan secara berkelanjutan adalah ekspansi atas surplus-produksi. Bahkan yang lebih penting lagi adalah ekspansi dari surplus-produksi tersebut mengandung tingkat keuntungan yang berlipat ganda (*compound rate*) —karenanya semua kurva pertumbuhan logistik (uang, modal, komoditi dan tenaga kerja) akan selalu menempel pada sejarah akumulasi kapital.

Praktik politik Kapitalisme karenanya akan selalu terpengaruh oleh kebutuhan terus-menerus dalam pencarian wilayah yang berguna bagi surplus-produksi dan penyerapan kapital. Dalam hal ini para kapitalis dihadapkan pada berbagai macam rintangan yang secara terus-menerus menimbulkan masalah bagi ekspansi kapital miliknya. Jika terdapat kelangkaan tenaga kerja dan upah buruh terlalu tinggi, maka tenaga kerja yang ada harus “di disiplinkan” (pemutakhiran teknologi yang dapat mengakibatkan pengangguran atau “penggemboan” serikat buruh—seperti yang terjadi pada zama Margaret Thatcher dan Ronald Reagan di tahun 1980an—merupakan 2 metode utama dalam pratik “pendisiplinan” gerakan buruh) atau tenaga-kerja yang baru harus di ciptakan (melalui prose imigrasi, ekspor Kapital keluar negeri atau menjalankan proses proletarisasi pada penduduk non-proletar seperti petani tradisional di pedesaan misalnya). Secara umum alat-alat produksi baru harus di temukan dan khususnya sumber-sumber daya alam baru mesti dicari, yang mana hal ini memberikan tekanan yang begitu besar pada alam karena akan terus menerus di keruk isi

buminya dalam rangka pencarian atas bahan-bahan mentah serta memaksa alam untuk menyerap begitu banyak limbah-limbah sisa produksi. Hukum persaingan bebas yang sangat ketat pun memaksa para Kapitalis untuk terus-menerus memperbaharui teknologi dan organisasi-nya sepanjang masa, hal ini di karenakan sejak para Kapitalis dengan kapasitas yang jauh lebih produktif mampu mengalahkan (*out-compete*) para pesaingnya yang masih teknologi sederhana (*inferior*). Inovasi artinya membentuk-ulang kebutuhan dan target baru, inovasi juga dapat mengurangi waktu-produksi dan ongkos-produksi yang tinggi yang di sebabkan oleh jauhnya jarak produksi. Inovasi memangkas jarak tersebut dalam rangka membebaskan gerak kapitalis dalam pencarian atas suplai tenaga kerja, bahan mentah dan sebagainya. Jika pasar yang ada tidak memiliki daya beli yang tinggi, maka pasar yang baru harus di ciptakan melalui perluasaan perdagangan luar negeri, mempromosikan gaya hidup dan produk baru, membuat instrument-kredit hutang yang baru dan melakukan pembiayaan atas pengeluaran-belanja negara melalui hutang. Dan akhirnya jika tingkat keuntungan masih terlalu

rendah, maka aturan negara yang dapat “menghancurkan pesaingnya”, praktik monopolisasi (merger dan akuisisi) dan memindahkan Kapital ke “padang rumput yang lebih segar” adalah solusinya.

Jika satu dari penghalang seperti yang disebutkan diatas menghantam para kapitalis secara terus-menerus, sirkulasi dan ekspansi Kapital akan terhenti sehingga akumulasi Kapital akan terganggu dan para kapitalis akan menghadapi krisis. Kapital tidak lagi memiliki keuntungan jika di investasikan kembali, akumulasi terhenti dan Kapital akan mendevaluasi dirinya (hingga hilang) dan bahkan untuk beberapa contoh Kapital di hancurkan secara fisik. Devaluasi terjadi dengan berbagai bentuk, surplus-komoditi bisa di devaluasi atau juga bisa di hancurkan kapasitas produktifnya dan aset bisa di gunakan kembali dalam bentuk nilai dan ditinggalkan begitu saja, atau uang sendiri bisa di devaluasi melalui inflansi, dan tentunya dalam keadaan krisis tenaga kerja di devaluasi melalui pengangguran besar-besaran. Kemudian dengan cara apakah kapitalis mendorong urbanisasi dalam rangka menghindari rintangan tersebut dan memperluas wilayah yang berharga bagi aktivitas para

kapitalis? Menurut saya urbanisasi memainkan peran yang khusus dalam (bersama dengan fenomena lainnya seperti peningkatan belanja militer suatu negara) penyerapan surplus-produksi yang di produksi terus-menerus oleh para kapitalis dalam pencarian mereka atas nilai-lebih.[4]

Revolusi Urban

Pertama-tama, lihat kasus yang menimpa kekacauan Prancis yang ke-2. Krisis ditahun 1848 merupakan krisis surplus-kapital dan surplus-tenaga kerja yang muncul bersama-sama serta krisis tersebut terjadi diseluruh daratan eropa. Krisis tersebut menghantam dengan sangat keras negara Prancis, khususnya kota Paris, yang mana hal ini melahirkan sebuah revolusi yang mandul yang di prakasai oleh buruh-buruh pengangguran beserta gagasan utopis para borjuis yang memandang Republik-sosial adalah obat penawar bagi keserakahan dan ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh kapitalisme. Republik-borjuis merepresi melalui kekerasan kaum revolusioner dengan sangat suksesnya namun gagal untuk menyelesaikan krisis ekonomi, hasilnya adalah Louis Bonaparte naik ketampuk kekuasaan, yang telah memprakasai sebuah

kudeta di tahun 1851 dan pada tahun 1852 memproklamkan dirinya sebagai kaisar Prancis yang baru. Agar kekuasaannya bisa bertahan secara politis, kaisar otoriter tersebut melakukan represi politik terhadap gerakan politik alternatif, namun bagaimanapun juga dia sadar harus menyelesaikan masalah penyerapan surplus-kapital dan dalam rangka menyelesaikan masalah ini dia mengumumkan program investasi infrastruktur besar-besaran baik di dalam maupun di luar negeri. Diluar negeri di mulailah sebuah proyek pembangunan rel kereta yang membelah Eropa dan masuk terus ke benua Asia seperti halnya dukungan dirinya atas pembangunan mega-proyek terusan Suez. Didalam negeri dia berusaha untuk mengkonsolidasikan pembangunan jaringan rel kereta, dan pembangunan dermaga dan pelabuhan. Tapi dari semua pembangunan tersebut terdapat sebuah rekonfigurasi infrastruktur perkotaan. Di kota Paris, Bonaparte memboyong Georges-Eugène Haussman ke kota Paris dan menunjuknya untuk melakukan pembangunan kota Paris pada tahun 1853.

Haussman paham bahwa tuganya bukan hanya untuk

membangun kota Paris namun juga ikut serta dalam membantu menyelesaikan permasalahan surplus-kapital dan pengangguran melalui urbanisasi. Pembangunan-ulang kota Paris menyerap jumlah tenaga-kerja dan kapital dengan kuantitas yang sangat besar untuk standar pembangunan kota pada masanya dan bersamaan dengan praktik penggemosan gerakan buruh melalui kekerasan yang mana dua hal tersebut merupakan kendaraan utama bagi stabilisasi sosial. Haussman menyusun rencana utopis (mengikuti gagasan Saint-Simon dan Charles Fourier) dalam mengubah kota Paris yang mana wacana ini pernah diperdebatkan oleh kaum Sosialis di tahun 1840an, tapi dengan satu perbedaan yang mencolok: dia merubah skala dari proses-urban yang pernah terbayangkan, ketika sang arsitek yang bernama Jacques Ignace Hittorff menunjukkan rencana atas pembangunan jalan besar yang baru pada Haussman, dia menolak usul tersebut sambil mengatakan "kurang lebar.... usulan anda selebar 40 meter dan saya ingin lebih lebar, buatkan dengan lebar 120 meter" skala pembangunan kota Paris yang di gagas oleh Haussman sangatlah besar. Rencana itu mencaplok kawasan

dipinggiran kota dan alih-alih memperbaiki di beberapa titik yang dirasa kumuh dia justru mendesain-ulang seluruh kawasan tersebut (termasuk les halles), dia merubah kota Paris secara keseluruhan. Untuk mengerjakan hal tersebut dia membutuhkan institusi-finansial dan instrumen-hutang baru yang dibuat berdasarkan garis-garis ajaran Saint-Simonian. Apa yang dilakukannya tersebut adalah untuk membantu menyelesaikan masalah pembuangan surplus-kapital dengan cara membuat semacam sistem proto-Keynesian dalam melakukan pembiayaan infrastruktur perkotaan yang di biyai oleh hutang.

Sistem tersebut berjalan dengan sangat baik hanya selama 15 tahun dan dalam sistem tersebut mengandung tidak hanya transformasi dari infrastruktur urban tapi juga mengkonstruksi-ulang semua jenis gaya hidup perkotaan yang baru serta membangun bentuk baru dari urban persona. Paris berubah menjadi “kota cahaya” pusat dari konsumsi, pariwisata dan semua jenis bentuk hiburan —*café*, pusat perbelanjaan, industri busana, eksposisi yang luar biasa dalam mengubah semua bentuk gaya hidup perkotaan yang mampu menyerap begitu banyak

surplus-produksi melalui konsumerisme (yang mana hal ini sangat banyak menyinggung tidak hanya para buruh miskin namun juga kaum tradisonal). Namun kemudian pada tahun 1868, dengan meningkatnya spekulatif dalam sistem-finansial dan sistem-kredit yang menjadi fondasi infrastruktur tersebut sistem ini pun pada akhirnya runtuh, Haussman didepak dari otoritasnya, dalam masa-masa depresi tersebut Napoleon ke-3 maju ke medan perang menghadapi Bismarck dari Prusia (Jerman) dan kalah. Dalam situasi kekosongan politik, muncul-lah Komune Paris, salah satu episode paling revolusioner sepanjang sejarah perkotaan Kapitalis. Komune tersebut lahir dari nostalgia dunia urban yang di hancurkan oleh Haussman (bayang-bayang revolusi 1848) dan hasrat untuk merebut kembali kota mereka yang pernah di bajak oleh proyek Haussman atas kota Paris. Tapi Komune tersebut juga merupakan konflik berkepanjangan dari visi masa depan atas Sosialisme (sebagai oposisi terhadap monopoli Kapitalis) yang justru menjadi arena perang gagasan dari kontrol hirarki-sentral (kaum Jacobin) melawan gagasan desentralisasi khas kaum Anarkis (kaum Proudhon). Pada tahun 1872, ditengah-tengah situasi

yang panas karena kedua pihak saling menyalahkan atas kekalahan komune Paris, terjadilah perpecahan politis diantara kaum Marxist dan para Anarkis yang mana perpecahan politis tersebut masih terjadi hari ini sehingga memecahkan gerakan kiri dalam perlawanannya terhadap Kapitalisme.[5]

Sekarang mari berpindah ke tahun 1942 di Amerika Serikat, masalah pembuangan surplus-kapital telah terasa sangat sulit diatasi sejak 1930an (dan pengangguran yang tak kunjung terselesaikan akibat depresi tahun di tahun 1930) namun untuk sementara bisa di selesaikan akibat mobilisasi besar-besaran dalam menghadapi persiapan perang dunia ke-dua. Tapi semua orang pada waktu itu sangatlah ketakutan mengenai apa yang kemudian akan terjadi setelah perang selesai. Situasi politik sangat genting pada waktu itu (pemerintah federal sedang melakukan nasionalisasi ekonomi yang berjalan dengan sangat sukses) dan Amerika Serikat sedang berada dalam sebuah aliansi dengan Uni Soviet dalam perang melawan Fasisme di Eropa, gerakan sosial sedang menjalin hubungan mesra dengan gerakan sosialisme yang muncul dalam merespon depresi

ekonomi di tahun 1930 dan juga dukungan dari gerakan kiri yang luas dalam persiapan perang dunia kedua. Kita semua tahu kelanjutan dari sejarah politik McCarthyisme dan perang dingin (banyak sekali tanda-tanda dari praktik politik tersebut bahkan sudah muncul muncul pada tahun 1942). Sama halnya di bawah Louis Bonaparte, represi politik dengan dosis yang besar terbukti sering di lancarkan oleh kelas penguasa dari waktu ke waktu dalam rangka mempertahankan kekuasaan mereka. Tapi bagaimana dengan masalah pembuangan surplus-kapital?

Di tahun 1942 muncul sebuah usaha untuk mengevaluasi usaha Haussman dalam jurnal *Architecture*, di jurnal tersebut terdokumentasikan secara mendetail mengenai apa-apa saja yang telah di lakukan oleh Haussman dan juga berisi analisa atas kegagalan-kegagalan yang di lakukan oleh Haussman, artikel tersebut di tuliskan oleh siapa lagi kalo bukan Robert Moses, dia lah yang setelah perang dunia kedua merubah seluruh kawasan metropolitan kota New York persis seperti yang dilakukan pada kota Paris.[6] Moses merubah skala gagasan mengenai proses-urban dan —melalui sistem pembangunan

jalan tol (yang dibiayai oleh dana-hutang) dan transformasi infrastruktur melalui sub-urbanisasi serta melalui perancangan-ulang (re-engineering) tidak hanya kota New York saja, namun seluruh kawasan metropolitan— Moses menemukan jalan baru untuk menyerap surplus-produksi dan dengan demikian bisa menyelesaikan masalah penyerapan surplus-kapital. Proses ini, ketika diterapkan dalam skala nasional, seperti halnya yang terjadi di pusat kota-kota metropolitan besar di seluruh AS (belum lagi jika terjadi perubahan skala urbanisasi di kemudian hari) akan memainkan peran yang sangat penting dalam rangka menstabilkan kembali kondisi kapitalis dunia pasca meletusnya perang dunia ke-dua (pada periode ini Amerika Serikat mampu mendukung perekonomian seluruh negara non-komunis di seluruh dunia melalui defisit perdagangan AS yang tinggi).

Sub-urbanisasi yang terjadi di Amerika Serikat bukan hanya soal pembangunan infrastruktur yang baru, sama halnya seperti yang terjadi pada masa kekaisaran ke-dua Prancis, proses urban tersebut juga mengandung transformasi radikal pada gaya hidup dan

memproduksi seluruh jalan-hidup baru yang dipengaruhi oleh prodak baru —dari tata letak kawasan perumahan sub-urban, hingga perabotan rumah tangga seperti kulkas dan pendingin ruangan, hingga pada dua lajur mobil dalam satu lintasan jalan raya serta peningkatan terhadap ketergantungan atas minyak bumi— yang mana memainkan perannya masing-masing dalam rangka penyerapan surplus. Sub-urbanisasi (bersama militerisme) memainkan peran yang sangat penting dalam membantu penyerapan surplus di periode pasca perang dunia ke-dua. Tapi suksesi tersebut berjalan bukannya tanpa sebuah konsekuensi, misalnya proses sub-urbanisasi yang telah berhasil tersebut sukses karena berhasil mengosongkan perumahan kumuh yang berada di tengah kota dan meninggalkan penduduk kumuh tersebut dalam kemiskinan karena sumber penghidupannya di hilangkan secara paksa atas nama pembangunan yang kemudian hal ini berujung pada sebuah krisis bernama “krisis-urban” yang muncul pada tahun 1960an dan menghasilkan sebuah pembangkangan sipil yang dilakukan oleh kaum minoritas (yang di dominasi oleh kaum Afrika-Amerika) di pusat-pusat kota, lantaran mereka

“dilarang” untuk bisa mengakses kesejahteraan yang tercipta itu.

Pembangkangan sipil tidak hanya sedang bergejolak di pusat kota, kaum tradisional yang berada di belakang Jane Jacob terus berusaha untuk mencari cara dalam melawan pembangunan berskala besar yang di lakukan oleh kaum modern seperti proyek yang dilakukan oleh Moses melalui bentuk baru estetika pembangunan yang berfokus pada pengembangan kawasan lokal tua yang bersejarah tapi sekeras apapun usaha kaum tradisional, pembanguan sudah terjadi dan transformasi radikal dalam gaya hidup sudah berjalan yang berarti semua bentuk konsekuensi social siap untuk di nikmati, contohnya, kaum Feminis memproklamirkan bahwa sub-urban beserta gaya hidupnya sebagai lokus dari akar semua bentuk semua bentuk kekerasan dan penindasan atas gender. Seperti halnya yang menimpa Haussman, sebuah krisis ekonomi mulai muncul ke permukaan yang akhirnya membuat Moses jatuh dari masa ke-emasannya serta semua solusinya menjadi tidak relevan dan tidak bisa diterima lagi di tahun 1960an. Jika kemudian “Haussmanisasi” yang terjadi di Paris memiliki peran dalam

menjelaskan dinamika yang terjadi pada masa komune Paris, maka kualitas pembangunan kehidupan sub-urban yang “tak bernyawa” memainkan peran yang sangat penting dalam pecahnya gerakan sosial yang dramatis di tahun 1968 di AS, sebagai bentuk dari ketidakpuasan yang mengkristal dari para mahasiswa kelas menengah berkulit putih yang memutuskan untuk melancarkan pembangkangan sipil dan mencari sebuah aliansi bersama kelompok minoritas yang termajinalkan lainnya kemudian bersama-sama turun kejalan dan memprotes praktik imperialisme yang dilakukan oleh AS serta gerakan tersebut menciptakan sebuah dunia “tandingan” yang mempertemukan pengalaman urban yang baru (dan lagi, momen ini dijadikan arena pertarungan gagasan diantara kaum Anarkis dan kaum Libertarian dalam rangka mencari bentuk alternatif lainnya dari tatanan sosial dengan kontrol hirarkisentral).[7]

Bersamaan dengan pemberontakan 68, muncul pula sebuah krisis finansial yang menimpa seluruh dunia (yang ditandai oleh runtuhnya perjanjian Bretton Woods) serta krisis tersebut berakar dari

ledakan harga properti (*property boom*) yang di prakasai oleh institusi kredit-hutang yang sudah berjalan sejak beberapa dekade kebelakang. Krisis tersebut mengumpulkan momentumnya pada akhir 1960an hingga seluruh sistem Kapitalisme runtuh pada krisis ekonomi dalam skala global, diawali oleh meletusnya gelembung pasar-properti di seluruh dunia pada 1973 dan di ikuti kebangkrutan finansial kota New York di tahun 1975. Hari-hari gelap di tahun 1970an telah tiba, dan pertanyaan berikutnya adalah **bagaimana caranya** menyelamatkan Kapitalisme dari kontradiksi yang tertanam di dalam dirinya sendiri. Dalam hal ini jika sejarah adalah petunjuk bagi masa depan kita maka proses urban adalah kunci. Sebagaimana yang pernah di jelaskan oleh Willia Tabb; krisis finansial kota New York pada tahun 1975 di orkestrai oleh aliansi yang kuat antara kekuatan negara dan institusi finansial, yang di pelopori oleh jawaban para Neoliberal dalam menjawab pertanyaan ini: kekuatan kelas pemodal telah di lindungi dari tuntutan kelas pekerja atas standar hidup yang lebih baik sementara itu pasar telah diregulasi untuk menciptakan standar hidup yang lebih baik, tapi kemudian

pertanyaanya adalah bagaimana caranya menghidupkan kembali kapasitas pasar untuk menyerap surplus yang tetap di produksi terus-menerus dalam rangka untuk terus bertahan hidup.[8]

Gurita Kapitalisme Global

Kita beralih sekali lagi pada masa konjungtur kita saat ini, Kapitalis internasional telah mengalami pasang-surut dari masa-masa keruntuhan dan krisis ekonomi yang hampir terjadi di seluruh kawasan di dunia (di Asia Timur dan Tenggara pada tahun 1997-98, Rusia di tahun 1998, Argentina di tahun 2001 dan seterusnya) sehingga krisis-krisis yang terjadi di kawasan tersebut berakumulasi dan pecah kembali dalam sebuah krisis yang lebih besar di tahun 2008. Lalu apa peranan proses-urbanisasi pada periode ini? Di Amerika sendiri hingga pada tahun 2008, semua orang percaya bahwa pasar-perumahan adalah stabilisator yang sangat penting bagi perekonomian dalam negeri, khususnya pasca krisis diakhir tahun 1990-an. Pasar-properti menyerap begitu banyak surplus-kapital secara langsung melalui program pembangunan yang baru (perumahan dan lahan yang di peruntukan bagi gedung perkantoran baik yang terletak

di pusat kota maupun yang berada di pinggiran kota). Sementara itu inflasi besar-besaran atas harga aset perumahan yang terjadi atas dukungan oleh gelombang besar pembiayaan-ulang hipotek (*mortgage*) dengan bunga yang sangat rendah sepanjang sejarah AS telah meningkatkan daya beli pasar dalam negeri AS untuk terus mengkonsumsi barang dan jasa. Pasar dunia menjadi stabil di beberapa bagian berkat ekspansi perkotaan dan spekulasi harga di pasar-properti AS, seperti halnya jumlah defisit perdagangan luar negeri AS yang sangat besar jika di banding dengan negara lain di seluruh dunia. AS meminjam dana sekitar 2 milyar Dollar per harinya hanya untuk membiayai praktik konsumerisme di dalam negeri dan membiayai perang di Irak dan Afghanistan selama dekade awal abad 21.

Namun skala dari proses-urban telah berubah jauh lebih luas, singkatnya proses ini berjalan secara mendunia, sehingga kita tidak bisa hanya menfokuskan perhatian kita pada proses yang terjadi di AS saja. Ledakan harga pasar-properti di Inggris, Irlandia dan Spanyol serta di beberapa negara lainnya telah membantu dinamika Kapitalis dunia seperti halnya proses

urbanisasi yang terjadi di AS, sementara itu di Tiongkok proses urbanisasi yang terjadi selama 20 tahun kebelakang secara radikal memiliki karakter yang sangat berbeda karena m e m f o k u s k a n p a d a pembangunan infrastruktur. Kecepatan dari proses-urban di Tiongkok meningkat sangat cepat setelah negara tersebut mengalami kemunduran ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Lebih dari seratus kota di Tiongkok telah dilalui oleh 1 juta orang yang berlalu-lalang selama 20 tahun kebelakang dan desa-desa kecil seperti Shenzhen, telah berubah menjadi kota metropolitan besar yang dihuni oleh 6 hingga 10 juta orang. Pembangunan zona industri pada mulanya di konsentrasikan di zona ekonomi khusus tapi kemudian cepat menyebar keluar zona khusus tersebut menuju wilayah-wilayah lainnya yang bersedia menyerap surplus-kapital yang kemudian di dulang kembali menjadi keuntungan yang lebih banyak. Proyek infrastruktur besar-besaran seperti pembangunan bendungan dan jalan tol —yang lagi lagi di biayai oleh dana-hutang— merubah lanskap geografis Tiongkok.[9] Setara dengan percepatan p e r t u m b u h a n p u s a t pembelanjaan, taman-taman IPTEK, bandara, dan pelabuhan

kontainer, semua jenis tempat rekreasi serta mencetak semua jenis institusi kultural baru bersamaan dengan kompleks-komplek perumahan mewah lengkap dengan lapangan golf, di tengah-tengah lanskap geografis yang serba mewah tersebut munculah asrama-asrama yang penuh sesak di jejal oleh para tenaga-kerja cadangan yang sebelumnya sudah di mobilisasi dari kawasan-kawasan pedesaan kumuh yang merupakan penyuplai kebutuhan utama atas buruh-buruh migran dengan harga murah. Seperti yang sudah kita saksikan sebelumnya, inilah konsekuensi dari proses urbanisasi bagi praktik penyerapan surplus-kapital dan ekonomi dunia yang semakin membesar.

Tiongkok adalah satu-satunya pusat dari proses urban yang benar-benar berjalan secara global, hal ini dikarenakan dengan integrasi yang luar biasa dari pasar-finansial global, mereka menggunakan fleksibilitas pasar-finansial global untuk membiyai proyek urban di seluruh dunia lewat hutang (lagi, tentunya) dari Dubai ke Sao Paulo dan dari Madrid, Mumbai hingga ke Hongkong dan London, semuanya didanai oleh hutang, contohnya, bank sentral Tiongkok telah aktif dalam

pembiayaan pasar-hipotek di AS, sementara itu Goldman Sachs sedang sibuk dengan pasar-properti di Mumbai dan modal dari Hongkong telah ditanamkan di Baltimore. Hampir di setiap kota di dunia kini sedang menyaksikan ledakan pembangunan yang diperuntukan bagi mereka yang kaya raya di tengah-tengah kota yang di banjiri oleh kaum imigran miskin seperti para petani di pedesaan yang tergusur dari tanahnya sendiri akibat praktik industrialisasi dan komersialisasi dunia agrikultur.

Ledakan pembangunan ini juga kita bisa saksikan di kota Meksiko, Santiago di Chili, di Mumbai, di Johannesburg, Seoul, Taipei, Moskow, dan seluruh Eropa (ledakan pembangunan paling dramatis terjadi di Spanyol). Sama halnya dengan apa yang terjadi di kota-kota negara Kapitalis kunci seperti London, Los Angeles San Diego dan New York (dimana-proses urban terjadi dengan skala yang lebih besar di tahun 2007 dibawah administrasi sang triliuner, Bloomberg). Pembangunan urbanisasi yang spektakuler, mewah, besar dan absurd muncul di Timur-Tengah di tempat seperti Dubai dan Abu Dhabi dalam rangka “membersihkan” sisa-sisa dari surplus-kapital yang muncul

akibat ledakan harga minyak dengan cara yang paling tidak adil secara sosial dan pemborosan bagi lingkungan alam (seperti halnya pembangunan lintasan ski indoors di tengah-tengah panasnya lingkungan padang pasir). Kita sedang menyaksikan perubahan skala dalam bentuk lainnya atas proses-urban—yang menyulitkan kita menangkap bahwa apa yang terjadi secara global ini memiliki kesamaan prinsip dari proses yang dilakukan Haussman pada kota Paris di masa kekaisaran ke-dua.

Tapi ledakan urbanisasi ini bergantung, seperti yang terjadi pada masa Haussman dan Moses, pada pembangunan institusi finansial yang baru dan pengaturan untuk mengorganisir kredit dalam rangka menjaga proses-urban tetap berjalan. Inovasi dibidang finansial muncul pada tahun 1980an, secara khusus Sekuritisasi dan paket-paket hipotek lokal di jual dengan bebasnya kepada para investor di seluruh dunia, dan inovasi tersebut manandai terjadinya pembuatan sebuah institusi finansial yang baru yang dapat memfasilitasi pasar-hipotek (*mortgage-market*) serta sebagai sarana untuk menyimpan surat-surat obligasi (*debt obligation*) yang mana hal tersebut memainkan peran yang

sangat penting dalam “inovasi institusi finansial”. Banyak sekali keuntungan yang diperoleh dari perubahan ini. Inovasi tersebut berhasil melakukan Praktik penyebaran resiko dan mengizinkan Surplus-tabungan (*saving pools*) untuk dapat mengakses kebutuhan akan surplus-perumahan dengan lebih mudah serta membuat tingkat suku bunga turun—sementara hal ini telah membuat peningkatan keuntungan bagi perantara-keuangan (*financial intermediaries*) yang telah membuat “keajaiban” ini terjadi. Tapi dengan di jalankannya praktik penyebaran resiko tidak membuat resiko itu hilang dengan sendirinya, faktanya adalah penyebaran resiko yang dilakukan secara luas justru telah mendorong perilaku para pelaku bisnis di tingkat lokal semakin beresiko karena sejak resiko tersebut bisa di pindahkan ketempat yang lain. Tanpa adanya kontrol atas pengaturan resiko (*risk-assessment controls*) pasar-hipotek tidak bisa dikendalikan sehingga apa yang terjadi pada “*Pereire-Brother*” di tahun 1867-1868 dan pemborosan finansial kota New York di awal tahun 1970an kemudian akan terulangi lagi oleh hipotek sub prima (ed. kredit perumahan jangka panjang)

dan krisis nilai-aset perumahan di tahun 2008. Krisis tersebut terkonsentrasi di dalam dan di pinggiran kota-kota AS (tanda-tanda yang sama bisa terlihat di Inggris) yang secara khusus berimplikasi sangat serius bagi kaum Afrika-Amerika dengan pendapatan yang rendah, para ibu single parent yang berada di pusat-pusat kota. Krisis tersebut juga bisa menjangkit mereka yang tidak mampu membeli perumahan dengan harga selangit di tengah kota, khususnya di wilayah baratdaya AS, sehingga Mereka harus pindah ke wilayah semi-pinggiran di kawasan metropolitan untuk bisa membeli perumahan dengan harga yang spekulatif beserta kemudahan kredit lainnya. Tapi siapa yang kemudian akan menghadapi perubahan biaya yang naik sangat tinggi dengan naiknya harga minyak dunia, sehingga pembayaran hipotek pun juga akan naik seperti halnya tingkat bunga pasar-properti yang semakin tinggi. Krisis ini juga berdampak pada infrastruktur dan kehidupan urban (seluruh lingkungan di kota-kota seperti Cleveland, Baltimore dan Detroit telah hancur akibat gelombang penyitaan rumah dan tempat usaha) serta mengancam seluruh arsitektur sistem finansial dunia dan memicu

kemunduran di semua bidang kehidupan manusia. seperti halnya yang terjadi di tahun 1970an, Singkatnya krisis ini sangat luar biasa. (termasuk respon cepat bank sentral swasta Amerika atas “uang-cepat” yang hampir membuat ancaman inflasi yang sangat besar, persis seperti yang terjadi tahun 1970an dan suatu tempat di masa depan nanti).

Tapi bagaimanapun juga situasi hari ini jauh lebih rumit dari sebelumnya sehingga memunculkan pertanyaan baru mengenai apakah kemudian krisis ekonomi ini bisa di pindahkan tempat lain (misalnya, Tiongkok). Pembangunan yang tidak merata secara geografis Mungkin untuk kesekian kalinya telah membantu sistem tersebut terhindar dari keruntuhan total secara mengglobal, seperti yang pernah terjadi pada tahun 1990an. Meskipun pada waktu itu Amerika Serikat sedang berada di tengah-tengah masalah tersebut. Tapi sistem finansial juga jauh lebih kompleks dari yang pernah ada sebelumnya.[10] Sekali saja Perdagangan “*split-second*” berbasis komputer, keluar dari jalurnya akan selalu mengancam pasar-saham(yang mana ikut serta dalam menciptakan “kondisi yang

berubah-ubah”di dalam pasar-saham) karena hal tersebut akan menciptakan sebuah perbedaan yang sangat besar yang memungkinkan untuk memproduksi sebuah krisis berskala besar, serta memerlukan pemikiran-ulang secara total atas bagaimana kapital-finansial dan pasar-uang beroperasi, termasuk hubungannya dengan urbanisasi.

Kemiskinan dan Pasifikasi

Sama halnya dengan semua fase sebelumnya, ekspansi yang radikal dari proses urban hari ini telah ikut membawa perubahan yang luar biasa dalam hal gaya hidup. Kualitas kehidupan urban telah menjadi komoditas bagi mereka yang memiliki uang seperti halnya kota itu sendiri. Di dalam sebuah dunia dimana konsumerisme, pariwisata, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berbasis pada industri telah menjadi aspek utama dalam ekonomi-politik perkotaan, bahkan di India dan Tiongkok. Kecenderungan kaum *post-modern* dalam mendorong formasi pasar, baik dalam pilihan gaya hidup urban, kebiasaan pembeli hingga bentuk kultural yang dikelilingi oleh pengalaman urban kontemporer dengan aura kebebasan untuk memilih dalam

pasar, asalkan anda memiliki uang dan biasa melindungi diri anda sendiri dari praktik privatisasi redistribusi kesejahteraan melalui perkembangan aktivitas Kriminal dan praktik pemalsuan (yang mana disemua tempat hal seperti meningkat sangat pesat). Pusat-pusat kompleks perbelanjaan dan perkembangan ruko-ruko *retail*, sama halnya dengan perkembangan gerai-gerai makanan cepat saji, pasar barang-barang seni, butik-butik kultural dan seperti yang Sharon Zukin Slyly tulis “ditenangkan oleh secangkir kapucino”. Bahkan dalam sistem tata letak pembangunan perumahan di pinggiran kota yang paling kacau, hambar dan monoton masih mendominasi di beberapa area telah menemukan obat penawar-nya bernama gerakan “urbanisme baru” yang telah melakukan teknik percaloan dalam menjual komunitas berserta gaya hidupnya tak ubahnya seperti prodak yang di hasilkan oleh para pengembang dalam rangka memenuhi impian urban. Ini adalah dunia dimana etika individualisme khas Neoliberal telah menjadi cetak-biru bagi kepribadian manusia dalam hidup di masyarakat. Dampaknya adalah meningkatnya perasaan terisolasi, kekhawatiran dan

penyakit saraf lainnya yang dirasakan oleh individu di tengah-tengah pencapaian sosial terbesar yang pernah dibangun dalam sejarah manusia dalam rangka merealisasikan hasrat di dalam hati kita.

Tapi retakan di dalam sistem ini terlihat sangat jelas. Kita hidup dalam Perpecahan, fragmentisasi, dan konflik-perkotaan yang semakin tinggi. Bagaimana cara kita memandang dunia bergantung pada sisi mana kita berada, pada bentuk konsumerisme seperti apa yang bisa kita akses. Pada satu dekade kebelakang kemunculan Neoliberalisme telah merestorasi kekuatan kelas orang-orang kaya dan orang-orang elite.[11] dalam beberapa tahun kebelakang saja beberapa manajer *hedge fund* di New York bisa meraup remunerasi pribadi sebesar 3 milyar Dollar dan bonus yang diterima oleh Wallstreet melonjak sangat tinggi, untuk satu orang saja dalam beberapa tahun saja seorang *best player* pialang saham bisa mendapatkan 5 hingga 50 milyar (dengan mengesampingkan kepemilikan harga properti mereka yang ada di Manhattan). 14 orang triliuner muncul di Meksiko sejak praktik Neoliberal di jalankan di negara tersebut pada tahun 1980an dan

hari ini Meksiko bisa berbangga diri bahwa orang paling kaya di dunia, Carlos Slim, hidup di negaranya dan pada saat yang bersamaan pendapatan orang-orang miskin di dalam negerinya tidak pernah bertambah malah berkurang. Pada akhir tahun 2009 (setelah krisis ekonomi paling buruk berakhir) terdapat 115 orang triliuner baru di Tiongkok, 101 di Rusia, 55 di India, 52 di Jerman, 32 di Inggris, 30 di Brazil serta 413 orang di AS.[12] Hasil akhir dari peningkatan polarisasi pendistribusian kekayaan dan kekuatan terukir dalam bentuk spasial di dalam kota-kota kita, yang mana hal ini semakin meningkatkan proses fragmentisasi yang terjadi di dalam kota dengan cara memagari dan mengawasi komunitas orang kaya beserta ruang publik yang telah di privatisasi. Proteksi kaum Neoliberal atas hak kepemilikan pribadi dan nilai-nilainya telah menjadi bentuk hegemoni politik, bahkan bagi kelas menengah kebawah. Khususnya di beberapa negara berkembang, kota:

“terbelah-belah menjadi beberapa bagian yang berbeda, dengan formasi seperti hanya “negara-mikro”. Wilayah-wilayah yang dihuni orang-orang kaya di lengkapi dengan semua

jenis layanan seperti, sekolah-sekolah eksklusif, lapangan golf, lapangan tenis, dan “polisi pribadi” yang berpatroli mengelilingi daerah tersebut yang mana saling bersebelahan dengan pemukiman ilegal dimana sumber mata air hanya tersedia di sumur (*fountain*) milik bersama, tanpa sanitasi, listrik hanya dinikmati oleh beberapa orang, jalanan berubah menjadi kubangan lumpur setiap kali hujan turun, rumah milik bersama adalah sebuah hal yang rumah, setiap fragmen yang muncul tampak hidup dan berfungsi secara otonom menempel erat pada apa yang bisa mereka ambil dalam pertarungan hidup sehari-hari dalam rangka bertahan hidup.”[13]

Dibawah kondisi ini, gagasan mengenai identitas urban, kewarganegaraan dari politik perkotaan sedang terancam oleh penyebaran penyakit etika individualistik Neoliberal yang dari hari ke hari sulit di tangkal. Bahkan gagasan mengenai fungsi kota sebagai badan politik yang bersifat kolektif, sebuah tempat dimana gerakan sosial progresif mungkin dapat, setidaknya, muncul kepermukaan semakin tidak masuk akal. Namun setidaknya ada banyak sekali bukti bahwa gerakan sosial di perkotaan terbukti sedang

mencari cara untuk mengatasi semua bentuk isolasi ini serta untuk mengubah bentuk kota dalam gambaran sosial yang jauh berbeda dari gambaran yang selama ini diberikan oleh para pengembangan yang di dukung oleh kekuatan finansial, perusahaan kapital dan aparatus negara yang bermentalkan *entrepreneur*. Hari ini administrasi kota bahkan yang paling konservatif pun sedang berusaha mencari cara untuk menggunakan kekuasaannya dalam melakukan eksperimen tidak hanya memproduksi sebuah proses urban namun sekaligus melakukan demokratisasi pemerintahannya (ed. Hal ini merupakan serangan balasan atas narasi Neoliberal yang sedang di praktikan hari ini). Apa ada alternatif lain bagi proses urban, meskipun ada, dari mana kah alternatif itu akan datang?

Penggusuran

Penyerapan surplus-kapital melalui transformasi urban bagaimanapun juga memiliki aspek yang kelam lainnya. Dalam hal tersebut terkandung serangan terus-menerus terhadap pembangunan-ulang perkotaan melalui “penghancuran kreatif” yang hampir selalu memiliki dimensi kelas, sejak urbanisasi selalu

merugikan kaum miskin, kaum tertindas dan mereka yang termajinalkan serta jauh dari kekuatan politik lah yang pertama kali menjadi korban atas proses-urban ini. Kekerasan di perlukan untuk dapat membentuk-ulang kota lewat cara menghancurkan mereka yang dinilai sudah usang bagi modernitas. Haussman sendiri menhancurkan kawasan tua dan kumuh di kota Paris menggunakan kekuatan negara yang seharusnya di gunakan bagi keuntungan masyarakat luas dan dalam proses tersebut dia menggunakan gaung “atas nama pembangunan”, perbaikan lingkungan dan renovasi perkotaan. Dia sengaja menggunakan kekuatan tersebut untuk menghapus gerakan buruh dan elemen perlawanan lainnya bersamaan dengan berjalannya proses industrialisasi yang “berbahaya bagi kesehatan” di pusat kota Paris, dimana mereka (ed. Gerakan buruh) telah di modifikasi-ulang sebagai ancaman bagi tatanan publik, kesehatan, dan tentu saja kekuatan politik. Haussman menciptakan sebuah perkotaan dari apa yang di yakini (namun ternyata salah, karena peristiwa 1871 terjadi) bahwa peningkatan anggaran belanja kota bagi pengawasan dan kontrol militer atas kota Paris

dan populasi di dalamnya dapat mengontrol munculnya gerakan revolusioner dengan mudahnya, tapi seperti yang pernah Engels katakan pada tahun 1872:

“Dalam kenyataanya, kaum borjuis hanya memiliki satu metode untuk menyelesaikan persoalan atas perumahan yaitu dengan membuat masalah yang lebih baru, metode tersebut bernama: “Haussman” (yang mana) maksud saya adalah praktik tersebut merupakan cara yang paling umum dalam menggusur perumahan para buruh di kota-kota besar kita, dan khususnya di beberapa area di pusat kota, terlepas dari apakah hal ini dilakukan berdasarkan atas sebuah pertimbangan bagi kesehatan publik atau dalam rangka memperindah kota atau di peruntukan bagi pusat kawasan bisnis atau sebagai kebutuhan bagi lalu lintas angkutan umum seperti jalur rel kereta api dan jalan raya (yang mana terkadang tujuannya adalah untuk mempersulit pembuatan barikade-barikade tempur buatan rakyat)....tidak jadi persoalan mengenai apa dan bagaimana solusinya karena hasilnya akan tetap sama; gang-gang sempit (ed.maksudnya adalah tempat prostitusi) yang penuh skandal dan memalukan itu lenyap seiring dengan

banjirnya pujian dari kaum borjuis atas keberhasilan yang luar biasa ini, namun kemudian gang-gang sempit tersebut akan muncul lagi dengan cepat di tempat lainnya....tempat berkembang biaknya penyakit yang berasal dari lubang dan gudang-gudang terkenal yang hampir sama dengan modus produksi kapitalis dalam rangka mengurung gerak langkah buruh-buruh kita malam demi malam tidak pernah bisa di hilangkan; karena tempat-tempat tersebut akan berpindah ketempat yang lainnya! Kebutuhan ekonomi yang sama telah memproduksi tempat tersebut.”[14]

Sebenarnya dibutuhkan lebih dari seratus tahun untuk “penaklukan” kaum borjuis atas pusat kota Paris dengan konsekuensi yang dapat kita lihat pada pemberontakan dan kerusuhan ditahun-tahun berikutnya yang terjadi di pinggiran kota Paris yang telah mengisolasi kaum imigran yang termajinalkan, buruh-buruh serta kaum muda pengangguran yang terperangkap di wilayah tersebut. Dan tentu saja hal yang meyedihkan adalah ketika proses urban ini berjalan, Engels pernah mengingatkan kita namun justru semua kemalang ini terus menerus di ulangi oleh sejarah perkotaan-Kapitalis.

Robert Moses (dalam kata-kata terkenalnya) “membawa kapak daging ke Bronx” dan ratapan yang keras dari lingkungan tersebut beserta kelompok dan gerakan sosialnya pada akhirnya akan bersatu di sekitaran retorika Jane Jacobs pada taraf penghancuran yang tak pernah terbayangkan atas tidak hanya susunan nilai-nilai perkotaan tapi terhadap seluruh komunitas yang hidup di dalamnya beserta jaringan integrasi-sosial yang telah lama terhubung.[15] Tapi untuk kasus yang terjadi di New York dan Paris, sekali saja kekuatan penggusuran yang brutal yang dilakukan oleh negara berhasil di lawan dan di bendung oleh agitasi yang di jalankan pada tahun 1968, proses transformasi yang jauh lebih berbahaya akan muncul melalui “pendisiplinan” keuangan pemerintahan kota secara “demokratik”, pasar-tanah, spekulasi harga properti dan penyortiran atas tanah yang akan di gunakan untuk pembangunan akan menghasilkan tingkat pengembalian finansial tertinggi atas tanah yang “bernilai tinggi”. Engels mengerti baik untuk apa hal ini di jalankan:

“Pertumbuhan kota-kota modern besar membuat tanah di beberapa kawasan, khususnya wilayah yang terletak di pusat

dengan sangat cepat meningkatkan nilai jual-nya; bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut justru malah menurunkan harga jualnya ketimbang meningkatkannya, karena bangunan tersebut bukan lagi bagian dari perubahan harga tanah di bawahnya. Bangunan tersebut bisa dihancurkan dan di ganti dengan bangun yang lebih baru. Semua hal ini terjadi pada semua perumahan buruh yang berlokasi di pusat-pusat kota, bahkan di wilayah dengan padat penduduk, tidak akan pernah bisa atau harga-harga properti hanya naik secara perlahan di bawah ambang maximum. toko-toko, gudang, gedung publik yang berdiri diatas tanah tersebut akan diruntuhkan.”[16]

Adalah sebuah hal yang begitu muram untuk memikirkan bahwa semua hal tersebut pernah di tulis pada tahun 1872 oleh Engels yang mana deskripsi yang ditulis beliau berlaku juga secara langsung bagi proses urban hari ini yang terjadi di Asia (Delhi, Seoul, Mumbai) sama hal seperti gentrifikasi kontemporer yang terjadi di, katakanlah, Harlem dan Brooklyn di kota New York. Sebuah proses perpindahan dan perampasan, singkatnya, juga terjadi di tempat-tempat

penting dimana proses urban berjalan dibawah kapitalisme. Ini adalah gambaran kecil atas penyerapan Kapital melalui pembangunan ulang perkotaan. Lihat kasus yang terjadi di kota Mumbai, dimana terdapat 6 juta orang yang di tetapkan secara resmi oleh pemerintah sebagai, penghuni pemukiman kumuh yang menetap di sebuah yang mana sebagian dari mereka tidak memiliki bukti legal atas tanah tersebut (tempat dimana mereka tinggal dibiarkan kosong pada peta resmi kota tersebut). Dengan usaha untuk mengubah kota Mumbai menjadi pusat finansial-global yang digadagadag akan menyaingi kota Shanghai, ledakan harga properti terjadi disana dan tanah yang di huni oleh para penghuni pemukiman kumuh tersebut tiba-tiba menjadi sangat berharga. Nilai atas tanah di Dharavi, salah satu pemukiman kumuh yang paling terkenal di kota Mumbai, di patok seharga 2 triliun, sehingga tekanan untuk mengosongkan wilayah kumuh tersebut (perbaikan lingkungan hidup dan sosial adalah topeng atas perampasan tanah yang biasa di gunakan) semakin kuat tiap harinya. Kekuatan finansial yang di bekingi oleh negara, memaksa untuk mengosongkan kawasan kumuh itu, dalam beberapa kasus kekerasan digunakan

untuk mengosongkan wilayah yang dihuni oleh penghuni pemukiman kumuh dari generasi ke generasi. Akumulasi kapital atas tanah tersebut melalui ledakan harga real-estate diperoleh hampir tanpa ongkos. Apa rakyat yang di paksa keluar dari tanahnya mendapatkan kompensasi? Beberapa diantaranya mereka yang beruntung memperolehnya oleh dengan harga yang murah. Namun sementara itu konstitusi negara India mengatur sangat jelas bahwa negara memiliki kewajiban untuk merawat dan melindungi seluruh tumpah darah orang India tanpa memandang kasta dan kelas, dan menjamin hak untuk mendapatkan serta memiliki perumahan dan tempat tinggal, namun meski demikian, mahkamah konstitusi India mengeluarkan ketetapan hukum yang mendorong untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi tersebut. Sejak para penghuni pemukiman kumuh di umumkan sebagai penghuni ilegal dan banyak dari mereka yang tidak bisa menunjukan surat kepemilikan atas lahan tersebut, sehingga mereka tidak memiliki hak atas kopemsansi apapun, untuk memberikan hak atas kompensasi tersebut, menurut mahkamah agung India hal tersebut sama halnya dengan

memberikan hadiah kepada pencopet atas aksi kriminalnya, sehingga para penghuni di kawasan kumuh tersebut hanya memiliki 2 opsi, opsi yang pertama adalah pindah dari tanahnya dengan membawa barang harga miliknya kemudian bermukim dan mendirikan tenda di pinggir jalan atau dimana pun dia bisa tinggal, opsi yang kedua adalah melawakan penggusuran.[17] Contoh yang serupa soal penggusuran (meskipun tidak terlalu brutal dan lebih legalistik) bisa ditemukan di Amerika Serikat, melalui penyalahgunaan hak domain untuk memindahkan penghuni (*long-term resident*) diperumahan yang layak dalam rangka untuk mendapatkan hak-guna atas perumahan tersebut (seperti kondominium dan ruko-ruko). Pertentangan terjadi di mahkamah agung Amerika Serikat dimana para liberal dengan argumennya melawan kubu konservatif dengan mengatakan bahwa hal tersebut (relokasi penghuni) sangat tepat bagi yurisdiksi lokal untuk melakukan hal seperti ini sehingga hal tersebut bisa meningkatkan penghasilan dari pajak properti.

Di Seoul pada tahun 1990, perusahaan kontruksi dan pengembang menyewa preman-preman yang memiliki badan

seukuran pesumo untuk menginvasi seluruh kawasan yang akan di gusur, tidak hanya bangunan rumah namun seluruh bangunan yang berdiri atas rumah mereka yang terlektak di pinggiran bukit kota tersebut yang sudah berdiri sejak 1950, dan pada tahun 1990 secara mengejutkan tanah mereka menjadi sangat berharga. Hampir di seluruh pinggiran bukit tersebut hari ini telah di kelilingi bangunan-bangunan tinggi yang tidak menyisakan jejak atas aksi penggusuran yang brutal di masa lalu. Di Tiongkok jutaan orang di gusur dari tanah yang mereka diami sejak lama. Absennya hak atas kepemilikan pribadi menjadi alasan utama mereka dengan mudah terusir dari tanahnya sendiri atas perintah negara, dengan memberikan dana kompensasi yang rendah (sebelum tanah tersebut di lempar kepada para pengembang dengan tingkat keuntungan yang tinggi). Dalam beberapa kasus, rakyat justru pindah dengan sukarela namun perlawanan rakyat juga dilaporkan terjadi dimana-mana, seperti biasanya represi brutal yang dilakukan oleh Partai Komunis adalah respon atas perlawanan rakyat. Dalam kasus Tiongkok, rakyat yang berada di pinggiran pedesaan adalah yang sering kali terkena penggusuran, hal tersebut menggambarkan

signifikansi argument Lefebvre yang pernah di lontarkannya pada tahun 1960an, bahwa perbedaan yang mencolok diantara kawasan urban dan rural secara bertahap menghilang menjadi satu set ruang yang keropos dari pembangunan geografis yang tidak adil dibawah komando hegemoni modal dan negara. Di Tiongkok, komune-komune pedesaan di pinggiran kota berubah dari petani pekerja keras yang miskin menjadi penyedia rumah sewa *a la* orang-orang kota yang senang berhela-hela (atau setidaknya hal tersebut dilakukan oleh pemimpin komune tersebut). Hal ini sama dengan kasus yang terjadi di India dimana kebijakan pengembangan zona ekonomi khusus hari ini sangat di istimewa oleh pemerintah pusat (federal) dan daerah telah membawa sebuah praktik kekerasan dalam menghadapi produsen agrikultur (petani), hal yang paling kotor dalam praktik tersebut adalah pembantaian masal yang di lakukan di Nandigran di Bangladesh barat, pembantaian tersebut di orkestrai oleh partai Marxist yang berkuasa pada waktu itu dalam rangka membuat jalan masuk bagi modal yang sangat besar dari Indonesia yang tertarik terhadap pengembangan

properti urban dan pengembangan industrial. Hak atas kepemilikan pribadi dalam kasus ini tidak menyediakan sebuah perlindungan.

Dan apa yang kemudian terlihat seperti proposal yang seolah-olah progresif karena telah memberikan hak atas kepemilikan pribadi kepada rakyat miskin dalam rangka memberikan asset-aset perumahan dan tanah supaya mereka bisa keluar dari kemiskinan tidak hanya kontradiktif justru malah menguatkan praktik perampasan tanah. Hal yang sama juga berlaku terhadap proposal yang di berikan kepada penghuni di Rio Favela (kawasan kumuh paling terkenal di Rio de Janeiro) yang hari ini sedang di perdebatkan. Tapi kemudian permasalahan yang muncul adalah orang orang miskin tersebut di landa oleh insekuritas pemasukan serta kesulitan finansial yang justru hal tersebut membuat mereka dengan sangat mudah di bujuk menjual aset mereka dengan harga yang relatif murah (tentu saja orang-orang kaya tidak akan pernah melepaskan aset dengan harga apapun. Hal ini lah yang membuat mengapa Moses mampu membawa “kapak daging”-nya ke hadapan mereka yang memiliki pendapatan

rendah di kawasan Bronx tapi tidak terhadap mereka yang kaya raya di kawasan Park Avenue), saya berani bertaruh bahwa jika trend seperti ini terus-menerus terjadi, 15 tahun kemudian seluruh wilayah yang berada di sisi-bukit yang sekarang di diami oleh favela akan di kelilingi oleh kondominum dengan harga yang fantastis dengan teluk Rio sebagai latar pemandangannya, sementara itu penghuni yang sudah lama tinggal kawasan favela akan tergusur dari wilayah tersebut.[18] Efek yang berkepanjangan dari program privatisasi Margaret Thatcher atas perumahan-sosial di pusat kota London telah menciptakan struktur harga perumahan dan struktur penyewaan rumah yang baru diseluruh kawasan metropolitan yang mana hal tersebut membuat rakyat dengan penghasilan rendah dan bahkan kelas menengah tidak dapat mengakses perumahan dimanapun yang terletak dekat pusat perkotaan. Permasalahan rumah dengan harga yang terjangkau seperti halnya masalah kemiskinan telah bergerak menyebar keseluruh dunia.

Contoh-contoh diatas mengingatkan kita bahwa solusi yang seolah-olah terlihat “progresif” tidak hanya

membuat penyelesaian masalah hanya berputar-berputar tanpa menyelesaikan tersebut namun justru menguatkan sumber masalah tersebut dan secara bersamaan memperpanjang rantai emas yang mengikat populasi yang dan termajinalkan dalam lintasan orbit sirkulasi dan akumulasi kapital. Hernando de Soto berargumen bahwa ketidakjelasan mengenai pembagian hak atas kepemilikan pribadi sangat mempengaruhi dalam membuat orang-orang miskin jatuh dalam kesengsaraan bagi mereka yang berada selatan belahan muka bumi (dengan mengabaikan fakta bahwa kemiskinan juga hadir pada masyarakat dimana hak atas kepemilikan pribadi sudah berdiri kokoh). Untuk lebih pastinya ada beberapa contoh dimana pemberiann hak tersebut (hak atas kepemilikan pribadi) seperti yang terjadi terhadap favela di Rio de Janeora atau pemukiman kumuh di kota Lima, Peru, akan membebaskan energi individu dan menyalurkannya lewat aktifitas kewirausahaan yang mengarah pada pencapaian individu. Namun, justru efek dari hal tersebut hanya akan menghancurkan sebuah bentuk kolektif atas solidaritas sosial seperti hal gotong royong hampir pasti akan menghilang karena tidak adanya kepastian

atas ketersediaan lapangan pekerjaan, misalnya yang terjadi Kairo, Julia Elyachar mencatat bagaimana kemudian kebijakan yang terlihat progresif tersebut telah menciptakan sebuah “pasar-perampasan” yang pada dasarnya berusaha untuk “menghisap habis” nilai-nilai moral ekonomi yang berdasarkan pada saling menghormati, saling membantu dalam rangka meningkatkan keuntungan bagi institusi Kapitalis.[19]

Banyak sekali komentar yang sama berlaku bagi praktik kredit-mikro dan finansial-mikro sebagai sebuah solusi terhadap kemiskinan global yang hari ini terjadi, solusi tersebut sangat di elu-elukan diantara institusi finansial yang berada di Washington. Kredit-mikro dalam inkarnasi sosial (seperti yang semula dibayangkan oleh pencetusnya seorang pemenang penghargaan nobel perdamaian bernama Yunus) telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru dan memiliki dampak yang cukup luar biasa terhadap relasi gender dengan konsekuensi yang cukup positif bagi perempuan di negara seperti india dan Bangladesh, tetapi hal tersebut memiliki konsekuensi lain seperti menerapkan sistem tanggung jawab kolektif untuk

pembayaran hutang yang dapat “memenjarakan” ketimbang “membebaskan”. dalam dunia keuangan mikro sebagaimana yang diartikulasikan oleh institusi finansial di Washington (sebagai lawan dari kredit-mikro yang diusulkan oleh Yunus yang lebih berorientasi pada skema yang terlihat lebih sosial seperti gotong-royong, saling membantu dan seterusnya) memiliki efek yang justru meningkatkan sumber pendapatan (dengan tingkat bunga sebesar 18 persen dan bahkan lebih besar) bagi institusi finansial dunia. Ditengah-tengah kemunculan struktur pemasaran yang mengijinkan perusahaan multinasional untuk mengakses pasar-agregat yang di bangun oleh 2 miliar orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari 2 Dollar per hari. Besarnya, apa yang di dalam dunia bisnis kemudian disebut sebagai “pasar di dasar piramida”, akan dengan mudahnya di tembus oleh “perusahaan besar” melalui pembangunan jaringan penjualan dengan para sales (yang kebanyakannya adalah perempuan) terhubung dengan rantai pemasaran dari gudang-gudang perusahaan multinasional ke vendor-vendor di jalanan.[20] Para sales-penjual (*salespeople*) membentuk sebuah relasi-sosial

kolektif dimana semua orang saling bertanggung jawab atas sesamanya yang disiapkan untuk menjamin pelunasan hutang ditambah bunga yang memungkinkan mereka untuk membeli komoditi di pasar sedikit demi sedikit. Seperti halnya pemberian hak atas kepemilikan pribadi, hal tersebut memungkinkan sebagian orang (dan dalam kasus ini kebanyakannya perempuan) bisa meningkat pendapatannya, sehingga dapat mengurangi masalah atas sulitnya akses yang di rasakan oleh masyarakat miskin dalam membeli barang-barang kebutuhan dengan harga yang masuk akal. Namun kemudian hal ini bukanlah sebuah solusi bagi permasalahan kemiskinan yang menimpa penduduk di perkotaan. Sebagian besar dari mereka yang ikut serta dalam system keuangan-mikro akan jatuh kedalam sistem perbudakan-hutang (*debt peonage*) dan memanjarakan dirinya pada sistem pengupahan (*remunerated*) yang buruk, yang menjembatani perusahaan multinasional dan populasi dari perkampungan kumuh kota dengan keuntungan yang selalu, tentu saja, jatuh kepada perusahaan multinasional. Inilah jenis struktur ekonomi yang akan menghambat eksplorasi bagi alternatif yang lebih baru,

sehingga hal tersebut tidak akan membuat kita mendapatkan semua bentuk hak apapun atas kota.

Memformulasikan Tuntutan

Urbanisasi, bisa kita simpulkan telah memainkan peran yang penting dalam penyerapan surplus Kapital dan telah berjalan dalam skala yang luar biasa, namun dalam perkembangannya proses “penghancuran kreatif” tersebut mengandung sebuah perampasan atas semua bentuk hak yang seharusnya di miliki oleh warga kota secara diam-diam. Dari masa kemasa hal tersebut berakhir dengan pemberontakan, seperti halnya yang terjadi di tahun 1871, ketika kaum-kaum tertindas tersebut bangkit dan memberontak untuk merebut kembali kota yang dahulu pernah hilang. Gerakan sosial di perkotaan pada tahun 1968 dari Paris, Bangkok dan kota Meksiko hingga Chicago, berusaha untuk mendefinisikan ulang kehidupan perkotaan yang jauh berbeda dari apa yang digambarkan oleh para pengembang Kapitalis dan negara. Jika semua kesulitan fiskal yang dialami oleh peningkatan konjungtur hari ini dan suksesi yang sangat luar biasa dari praktik Neoliberal, *post modernist*, dan

konsumerisme didalam sebuah fase dimana Kapitalisme menyerap surplus melalui proses urbanisasi telah bertemu dengan ajalnya dan jika krisis yang lebih besar terjadi, maka pertanyaan selanjutnya adalah dimana gerakan 68 kita atau jika ingin yang lebih dramatis lagi, dimana komune Paris versi kita?

Dengan menganalogikan perubahan yang terjadi di dalam sistem keuangan, jawaban politis atas pertanyaan tersebut jauh lebih kompleks khususnya pada masa kita, dimana proses urban telah menjadi fenomena global serta memiliki daya hancur yang lebih besar bersamaan semua bentuk celah-celah, insekuritas dan pembangunan yang tidak merata. Tapi retakan yang berada di dalam sistem tersebut, seperti yang pernah di dendang oleh Leonard Kohen “apa yang membuat cahaya itu masuk”, adalah sebuah tanda-tanda bagi pemberontakan yang terjadi d i m a n a - d i m a n a (pembangkangan yang tak henti-hentinya terjadi di Tiongkok dan India sangat kronis, perang saudara pecah di Afrika, kekacauan terjadi di Amerika Latin dan gerakan otonom muncul dimana-mana, bahkan di Amerika Serikat hampir seluruh orang menyerukan “*enough is enough*”

atas semua bentuk ketidakadilan). Semua bentuk pembangkangan sipil ini tiba-tiba tidak bisa terbencong (contagious), Tidak seperti halnya sistem keuangan, gerakan sosial di perkotaan dan gerakan sosial di pinggiran kota sebagai gerakan oposisi yang terjadi diseluruh dunia, belum pernah bersatu-padu maju sebagai satu kesatuan kekuatan sosial. Memang, diantara keduanya memang tidak memiliki hubungan satu sama lainnya. Sehingga satu percikan saja tidak akan, meminjam istilah *weather underground*, membakar seluruh padang rumput kering. Kita butuh sebuah serangan yang lebih sistematis dari yang sebelumnya. Tapi jika 2 gerakan oposisi ini pada suatu waktu bertemu dan berjalan bersama—contohnya, katakanlah dibawah jargon-jargon hak atas kota- kemudian apa yang harus mereka tuntut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu saja sangat mudah, yaitu; kontrol yang luas atas penggunaan surplus-produksi secara demokratik, sejak proses urban adalah alat utama bagi penyerapan surplus-produksi, maka hak atas kota di bentuk melalui pembentukan kontrol demokratik atas penyebaran surplus melalui

urbanisasi. Ketika kita memiliki surplus-produksi hal tersebut bukanlah sebuah hal yang buruk: tentunya didalam beberapa situasi, surplus merupakan sebuah hal yang penting dalam rangka bertahan hidup. Di sepanjang sejarah kapitalisme, beberapa dari nilai-lebih (*profit*) yang tercipta bisa di jadikan subjek pajak oleh negara dan dalam fase (negara) sosial-demokratik, proposisi tersebut (ed.hasil pajak) meningkat sangat pesat sehingga membuat surplus-surplus tersebut berada di bawah kontrol negara. Semua jenis proyek Neoliberal yang telah terjadi lebih dari 30 tahun lalu lebih berorientasi pada privatisasi atas kontrol terhadap surplus tersebut. Bagaimanapun juga Data dari seluruh negara OECD menunjukkan bahwa pendapatan pajak atas pengeluaran bruto yang di lakukan oleh negara, bergerak secara konstan sejak 1970an. Kemudian satu-satunya pencapaian Neoliberal adalah perannya dalam menghalangi negara untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak dari hasil pajak seperti hal nya yang terjadi di tahun 1960an. Salah satu usahanya adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan baru yang mengintegrasikan antara kepentingan negara dan

kepentingan korporasi serta melalui kekuatan uang yang memastikan kontrol atas pencarian (*disbursement*) surplus melalui bantuan aparatur negara terhadap Kapital korporat dan kalangan atas dalam rangka membentuk proses urban. Peningkatan surplus terhadap pendapatan pajak di bawah kontrol negara hanya akan berjalan dan menguntungkan bagi kesejahteraan warganya jika negara tersebut di reformasi atau di rebut kembali oleh rakyat dengan kontrol yang jauh lebih demokratik.

Dari hari ke hari kita menyaksikan bahwa hak atas kota telah jatuh ketangan kepentingan segelintir orang. Contohnya di kota New York, kita memiliki walikota sekaligus triliuner, Michael Bloomberg, yang telah mengubah ulang kota tersebut dengan proyek-proyek yang menguntungkan para pengembang, elite-elite *Wallstreet* (bursa saham) dan elemen kelas Kapitalis transnasional, sementara itu secara terus menerus menjual kota tersebut sebagai sebuah lokasi yang optimal bagi bisnis yang bernilai tinggi serta sebagai tujuan yang paling fantastis bagi para turis, sehingga mengubah Manhattan sebagai tempat tinggal bagi

komunitas orang kaya (slogan pembangunannya sangatlah ironis, “membangun seperti Moses dengan gagasan Jane) Jacob[21]. Di Seattle triliuner lainnya, seperti Paul Allen melakukan hal yang sama, dan di kota Meksiko orang terkaya di dunia, Carlos Slim, telah mengubah pusat kota tersebut sebagai daya pikat para turis, sehingga hal ini telah membuat individu-individu secara berlebihan dalam mempergunakan kekuatannya secara langsung. Di sebuah kota di New Haven yang tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk melakukan investasi ulang di kotanya namun pada akhirnya proses urban tetap berjalan lancar berkat Universitas Yale, salah satu universitas terkaya di dunia memberikan dana investasi sekaligus menjadi otak bagi pembangunan ulang kota tersebut. Jhon Hopkins juga melakukan hal sama di timur Baltimore sama halnya dengan Universitas kolombia yang juga ikut menjalankan hal tersebut di pinggiran kota New York (yang mana hal ini memicu gerakan perlawanan yang meletus di kedua tempat tersebut, mirip dengan usaha perampasan lahan yang terjadi di Dharavi). Hak atas kota yang paling nyata justru, di banyak kasus, jatuh ketangan kelompok kecil politisi

dan elit-elit ekonom yang berada pada posisi dalam untuk mengubah kota jauh melampaui kepentingan dan hasrat dalam hatinya.

Tapi mari kita lihat situasi ini jauh lebih sistematis. Pada bulan Januari, estimasi total bonus yang diterima *Wallstreet* atas kerja kerasnya selama satu tahun ke belakang di publikasikan. Ditahun 2007, dimana tahun kehancuran bagi pasar-finansial dengan ukuran apapun (meski sama buruknya dengan tahun berikutnya). Bonus yang di terima naik hingga 33.2 triliun Dollar, naik 2 persen dari tahun sebelumnya. Pada pertengahan musim panas di tahun 2007, *The Feds* (ed. Federal Reserve akan di sebut dalam artikel ini dengan sebutan *The Feds*) dan bank sentral Eropa menggelontorkan triliunan Dollar kredit jangka-menengah untuk sistem finansial dalam rangka menjaga stabilitasnya, sehingga *The Feds* secara dramatis menurunkan suku bunga setiap kali pasar *Wallstreet* terancam runtuh, sementara itu 2 hingga 3 triliun rakyat yang di dominasi oleh campuran wanita *single parent* dan kaum Afrika-Amerika di pusat kota hingga kaum kulit putih yang termarginalkan di pinggiran kota telah dan terancam menjadi tunawisma

yang di karenakan oleh penutupan (ed. Karna tidak mampu membayar sewa). Seluruh komunitas di lingkungan perkotaan dan pinggiran kota diseluruh kota di AS telah di vandalisasi, dipaksa tutup, hingga hancur akibat praktik peminjaman uang yang dilakukan oleh institusi keuangan. Orang-orang yang terpapar praktik tersebut tidak menerima bonus apapun (ed. tidak seperti *wallstreet*). Tentunya, sejak penutupan (ed. bisnis) yang berarti pengampunan atas hutang dan hal ini termasuk kedalam penghasilan, banyak dari mereka yang mengalami penutupan akan di hadapkan kan pada pajak penghasilan yang tinggi atas uang yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Kondisi asimetris yang mengerikan ini menimbulkan satu pertanyaan yang baru: kenapa *The Feds* dan depatemen keuangan AS tidak mengucurkan likuiditas jangka-menengah untuk menolong kepala rumah tangga yang mengalami acaman penutupan hingga restrukturisasi hipotek pada tingkat harga yang wajar bisa menyelesaikan masalah ini?

Keganasan dari krisis kredit bisa di kurangi dan rakyat miskin serta lingkungan yang mereka huni bisa dilindungi. Lagipula

sistem finansial global tidak akan mungkin terhuyung-huyung diambang kehancuran total jika hal tersebut dilakukan. Dan hal ini juga sudah pasti akan memperpanjang tugas The Feds melampaui wewenang normalnya sehingga mereka bisa melawan peraturan ideologis Neoliberal didalam arena konflik hidup-mati antara keberlangsungan hidup sistem finansial dan rakyat, serta hal tersebut akan membuat sebuah pemberontakan terhadap prefensi kelas Kapitalis atas distribusi pendapatan dan gagasan Neoliberal tentang tanggung jawab personal. Tapi lihat saja harga yang harus di bayar untuk mengamati peraturan tersebut beserta hasil yang tidak masuk atas praktik penghancuran kreatif tersebut. Tentunya bukankah sesuatu bisa dan harus dilakukan untuk mengubah pilihan politis ini?

Tapi kita belum pernah melihat gerakan oposisi atas semua permasalahan yang menimpa kita pada abad 21, tentunya ada berbagai banyak hal perbedaan dari perjuang urban dan gerakan sosial (gerakan sosial di pedesaan juga termasuk ke dalam istilah yang lebih luas ini) yang pernah ada. Inovasi-inovasi urban yang lebih berorientasi pada pelestarian lingkungan, penggabungan kultural kaum

imigran serta desain urban terhadap ruang-ruang perumahan publik sudah mulai tampak bermunculan di seluruh dunia, namun mereka belum pernah bertemu pada tujuan utama dalam mengontrol secara luas atas penggunaan surplus (apalagi soal kondisi produksinya). Satu langkah, meskipun bukan final, unifikasi dari perjuangan ini adalah untuk memfokuskan pada momen-momen penghancuran dimana perekonomian dari akumulasi kekayaan yang ditunggangi oleh kekerasan dalam praktik perampasan ekonomi tersebut dan atas nama rakyat yang tertindas mereka memproklamirkan hak mereka atas kota —hak untuk mengubah dunia, hidupnya dan hak untuk menciptakan-ulang kota-kota mereka jauh melampaui hasrat dalam hatinya. Hak kolektif tersebut, bukan hanya sebagai slogan perjuangan namun juga sebagai gagasan politik, membawa kita kembali pada pertanyaan lama kita mengenai siapa yang mengkomandoi koneksi antara urbanisasi, surplus produksi dan penggunaan surplus produksi, bagaimanapun juga mungkin Lefebvre memang benar, lebih dari 40 tahun yang lalu, dia bersikeras mengatakan bahwa revolusi dimasa kita hidup harus terjadi perkotaan, atau tidak

sama sekali.

Catatan

[1] Robert Park, *On Social Control and Collective Behavior*, Chicago: Chicago University Press, 1967: 3.

[2] Friedrich Engels, *The Condition of the Working-Class in England in 1844*, London: Penguin Classics, 2009; Georg Simmel, "The Metropolis and Mental Life," in David Levine, ed., *On Individualism and Social Forms*, Chicago : Chicago University Press, 1971.

[3] Mike Davis, *Planet of Slums*, London: Verso, 2006.

[4] Untuk lebih lanjut mengenai ide-ide ini lihat David Harvey, *The Enigma of Capital, and The Crises of Capitalism*, London: Profile Books , 2010.

[5] David Harvey, *Paris, Capital of Modernity*, New York: Routledge, 2003.

[6] Robert Moses, "What Happened to Haussmann" Architectural Forum 77 (July 1942): 57-66; Robert Caro, *The Power Broker: Robert Moses and the Fall of New York*, New York: Knopf, 1974.

[7] Henri Lefebvre, *The Urban*

Revolution, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.

[8] William Tabb, *The Long Default: New York City and the Urban Fiscal Crisis*, New York: Monthly Review Press, 1982; David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford: OUP, 2005.

[9] Thomas Campanella, *The Concrete Dragon: China's Urban Revolution and What it Means for the World*, Princeton, NJ: Princeton Architectural Press, 2008.

[10] Richard Bookstaber, *A Demon of Our Own Design: Markets, Hedge Funds, and the Perils of Financial Innovation*, New York: Wiley, 2007; Frank Partnoy, *Infectious Greed: How Deceit and Risk Corrupted Financial Markets*, New York: Henry Holt, 2003.

[11] David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*; Thomas Edsall, *The New Politics of Inequality*, New York: Norton, 1985.

[12] Jim Yardley and Vikas Bajaj, "Billionaires' Ascent Helps India, and Vice Versa," New York Times, July 27, 2011.

[13] Marcello Balbo, "Urban

Planning and the Fragmented City of Developing Countries:" Third World Planning Review 15: 1 (1993): 23-5.

[14] Friedrich Engels, *The Housing Question*, New York: International Publishers (1935): 74-7.

[15] Marshall Berman, *All That Is Solid Melts Into Air*, London: Penguin, 1988.

[16] Friedrich Engels, *The Housing Question*: P.23.

[17] Usha Ramanathan "I llegality and the Urban Poor:" *Economic and Political Weekly*, July 22, 2006; Rakesh Shukla, "Rights of the Poor: An Overview of Supreme Court;" *Economic and Political Weekly*, September 2, 2006.

[18] Gagasan ini berasal dari karya Hernando de Soto, *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*, New

York: Basic Books, 2000; lihat pengujian yang dilakukan secara kritis oleh Timothy Mitchell, "The Work of Economics: How a Discipline Makes its World;" *Archives Europeennes de Sociologie* 46: 2 (2005): 297-320.

[19] Julia Elyachar, *Markets of Dispossession: NGOs, Economic Development, and the State in Cairo*, Chapel Hill, NC: Duke University Press, 2005.

[20] Ananya Roy, *Poverty Capital: Microfinance and the Making of Development*, New York: Routledge, 2010; C.K. Prahalad, *The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits*, New York: Pearson Prentice Hall, 2009.

[21] Scott Larson, "Building Like Moses with Jane Jacobs in Mind;" PhD dissertation, Earth and Environmental Sciences Program, City University of New York, 2010.

Judul Asli: David Harvey (2012) *The right of The City*

Sumber: *Rebel Cities: From The of The City*

***To The Urban Revolution*, New York: Verso Books**

halaman 3-26.

Pengalih Bahasa: wisnuprimason

JL. MALIOBORO

រាជធានី ភ្នំពេញ

Bangun Terus, Terus Bangun

Oleh: Dekong



Film dokumenter yang berjudul “Belakang Hotel” (Watchdog:2015) merupakan salah satu dari serangkaian film yang diproduksi oleh Watchdog. Film ini berlatarkan kehidupan masyarakat urban di Yogyakarta, yang mana kota tersebut telah bertransformasi menjadi kota wisata dengan kearifan lokal sebagai komoditi utama yang ditawarkan kota ini. Selain menjadi kota wisata dengan kearifan lokal sebagai komoditi utama, Yogyakarta pun menawarkan wisata alam dengan gunung merapi dan sisa abu vulkaniknya. Dan, konsekuensi dari transformasi menjadi kota dengan daya Tarik wisata adalah pembangunan hotel yang semakin meningkat dan pesat untuk menampung wisatawan yang datang.

Dalam sepuluh tahun terakhir telah terjadi peningkatan kamar hotel, yakni dari 7237 unit kamar pada tahun 2003 dan naik menjadi 10.303 unit kamar. Dengan kata lain, sebanyak 3066 unit kamar telah dibangun dalam kurun waktu 10 tahun. Berdasarkan data Skyscrapercity forum Indonesia, sudah ada 55 bangunan bertingkat diatas 6 hingga 18 lantai di Yogyakarta. Selain yang telah selesai dibangun atau telah berdiri, ada sekitar 25 bangunan bertingkat diatas 8 lantai yang masih dalam tahap pembangunan

dan terdapat 16 proposal pembangunan hotel/apartemen baru yang akan di bangun di Yogyakarta. Dengan demikian, ada sekitar 96 bangunan diatas 6 lantai yang berdiri di Yogyakarta, yakni 55 yang sudah berdiri, 25 dalam tahap pembangunan, dan 16 dalam bentuk proposal.[1]

Memang secara ekonomis, hotel memberikan pajak atau pemasukan ke kas Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah atau APBD. Secara ekonomis menguntungkan, akan tetapi secara sosial memiliki dampak domino bagi masyarakat, mulai dari krisis air, penggusuran atas nama tata kelola kota atau estetika kota, dan tercerabutnya kehidupan warga dari ruang hidupnya. Karena, permasalahan agraria tidak hanya melulu perihal tanah atau sawah, melainkan suatu yang lebih luas, yakni ruang hidup. Berbicara mengenai Agraria mau tidak mau kita juga harus berbicara mengenai tanah, air, dan angkasa serta ruang hidup terbentuknya suatu masyarakat dengan sosial budayanya. Dan, salah satu fokus dari film “Belakang Hotel” adalah krisis air yang menimpa warga sekitar hotel yang terpapar oleh dampak dari pembangunan tersebut.

Salah satu warga Miliran yang terpapar dampak dari pembangunan tersebut, Dodok Putra Bangsa melakukan aksi mandi pasir di depan Fave Hotel, mandi pasir merupakan aksi simbolik yang dimana sumur-sumur warga mengalami kekeringan. Lebih lanjut, Dodok mengatakan bahwa warga harus memahami pembangunan hotel, akan tetapi hotel tidak memahami warga. Dengan kata lain, adanya sebuah kesalahan logika yang mana warga harus memahami dan menghormati kepentingan hotel tapi tidak sebaliknya. Lebih lanjut, pihak dari BLH (Badan Lingkungan Hidup) Yogyakarta mengatakan bahwa sumur warga yang kering diakibatkan oleh kemarau. Akan tetapi, warga yang telah tinggal berpuluh tahun tidak pernah mengalami kekeringan air di musim kemarin sebelum adanya pembangunan hotel. Bagi para pendukung pembangunan, mereka percaya bahwa pembangunan adalah sebuah keniscayaan bagi manusia dan selalu berbanding lurus dengan ekonomi, tapi dampak-dampak social yang dihasilkan memiliki konsekuensi yang lebih besar. Dalam Artikel ini, saya akan membahas pembangunan secara umum.

Kota dan Pembangunan dalam narasi Kapitalisme

Pembangunan wilayah kota dan desa memiliki watak yang sangat berbeda, akan tetapi memiliki akar yang sama, yakni akumulasi modal. Dan, disetiap pembangunan akan selalu ada kelompok yang terpinggirkan. Jika di desa, para petani menjadi korban dari pembangunan pabrik, tambang maupun alih fungsi sawah. Akumulasi primitif adalah proses historis pemisahan produsen mandiri dari sarana-sarana produksinya (tanah) sehingga menjamin keberadaan golongan pekerja bebas dan pranata kerja upahan beserta pasarnya.[2] Dengan kata lain, akumulasi primitif—atau bahasa populernya ialah *land grabbing*—adalah prasyarat pembangunan, yakni alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan para petani kehilangan alat produksinya. Lebih lanjut, perampasan-perampasan tanah didesa bertujuan untuk membangun sarana-sarana ekonomi rill, yakni Pabrik, Pertambangan, serta Hutan Tanaman Industri seperti kelapa sawit.

Dengan kata lain, desa dan kota memiliki sebuah relasi yang tidak bisa kita lepaskan begitu saja atau mereduksikannya. Tanpa adanya desa, kota tidak akan memiliki pasokan pangan dan lain sebagainya. Dengan

demikian, pembangunan di desa dan kota memiliki sebuah relasi sosial yang tidak bisa hilangkan. Walaupun, secara abstrak relasi tersebut tidak kita rasakan. Sebaliknya dengan desa, kota memiliki sebuah sejarah yang panjang dalam perkembangan manusia. Dulu, demokrasi lahir dari wilayah yang sangat kecil, yakni kota atau polis dan dalam beberapa literatur disebutkan bahwa demokrasi lahir di Athena yang notabene berstatus kota dan sering disebut sebagai “negara-kota”. Henri Lefebvre, dalam bukunya yang berjudul *The Urban Revolution*, mengatakan bahwa:

“The political city accompanies or closely follows the establishment of organized social life, agriculture, and the village. The political city was populated primarily by priests, warriors, princes, “nobles,” and military leaders, but administrators and scribes were also present. The political city is inconceivable without writing: documents, laws, inventories, tax collection. It is completely given over to orders and decrees, to power”. [3]

Dengan kata lain, kota merupakan sebuah ruang dimana segala administrasi dan pemerintahan bekerja. Yakni, kota merupakan sebuah jantung dari sebuah pemerintahan yang mengatur

segala aktivitas ekonomi, sosial, politik dan hukum. Henry Lefebvre mengungkapkan bahwa *“the city prior to industrialization accelerates the process (in particular, it enables the rapid growth of productivity). The city has therefore played an important role in the take-off of industry.”* [4] Maka dari itu kota merupakan jaring-jaring kapitalisme dalam mengakumulasi dirinya. Yakni sebagai ruang dimana barang-barang hasil produksi didistribusikan dan sebagai tempat perputaran uang. Karena, kota menjadi pusat perekonomian yang dimana perputaran uang begitu pesat dengan adanya mall, supermarket, hotel, apartemen, arsitektur tua, museum atau dalam hal ini, kota menjadi tempat penyedia jasa. Selain jasa, sejarah dan budaya dari kota itu sendiri menjadi sebuah nilai-lebih dalam logika kapital dan menjadi nilai jual untuk menarik para wisatawan.

Seperti yang terjadi di Kota Bandung, yang hari ini pembangunan kota begitu massif. Tiap sudut kota dipoles sedemikian rupa dan dipercantik untuk menarik wisatawan dalam negeri dan luar negeri. Pembangunan

dengan dasar estetika merupakan dampak dari pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bandung dan Jakarta serta jembatan pasopati yang menjadikan Kota Bandung sebagai tujuan wisata. Sejarah pun mencatat bahwa di Kota Bandung yakni Braga adalah pintu masuk pakaian-pakaian eropa dan menjadikan Bandung sebagai Paris Van Java. Dengan demikian, pembangunan hotel menjadi sangat fundamental ketika sejarah dan budaya menjadi nilai jual kota dalam menarik wisatawan dan untuk menambah uang kas APBD dengan begitu masifnya perputaran uang di dalam kota.

Konsekuensi atas konsekuensi

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa pembangunan merupakan sebuah pedang bermata dua yang dimana memiliki dampak positif secara ekonomi dan dampak negatif secara sosial. Walaupun pembangunan desa dan kota sangatlah berbeda, akan tetapi adanya sebuah prakondisi yang sama, dimana konflik-konflik sosial baik di desa maupun kota terbentuk akibat perebutan agraria atau ruang hidup. Karena, agraria tidak hanya membahas perihal tanah maupun sumber daya alam yang terkandungnya. Melainkan, ada sebuah konteks sosial, sejarah, budaya, politik dan ekonomi didalam agraria atau

ruang hidup. Karena, agraria atau ruang hidup memiliki aspek Hak Asasi Manusia. Perampasan lahan atau ruang hidup merupakan sebuah prakondisi yang dibentuk sebelum pembangunan. Sehingga, ruang hidup menjadi pangkal dari konflik-konflik yang terjadi dan hingga saat ini belum terselesaikan dengan baik.

Catatan

[1] Data angka di peroleh dari <https://tirto.id/risiko-dan-nasib-buruk-pembangunan-hotel-di-yogyakarta-bkWG>, di akses pada tanggal 20 Desember 2017.

[2] Dede Mulyanto, *Genealogi Kapitalisme: Antropologi dan Ekonomi Politik Pranata Eksploitasi Kapitalistik*, Resist Book, Yogyakarta, Januari 2012, Hlm. xiii.

[3] Henri Lefebvre, penj. Robert Bononno, *The Urban Revolution. Minneapolis, USA*. University of Minnesota Press, 2003. Hlm. 8.

[4] Henri Lefebvre, penj. Eleonore Kofman dan Elizabeth Lebas, *Writings on Cities*. Massachusetts, USA. Blackwell Publishers Inc, 2000. Hlm 69.

Referensi

Kresna, Mawa. (2017 Juli). *Resiko dan Nasib Buruk Pembangunan Hotel di Yogyakarta*. Di akses dari <https://tirto.id>

Lefebvre, Henri. penj. Robert Bononno, *The Urban Revolution*. Minneapolis, USA. University of Minnesota Press, 2003.

Lefebvre, Henri. penj. Eleonore Kofman dan Elizabeth Lebas, *Writings on Cities*. Massachusetts, USA. Blackwell Publishers Inc, 2000.

Mulyanto, Dede. *Genealogi Kapitalisme: Antropologi dan Ekonomi Politik Pranata Eksploitasi Kapitalistik*, Resist Book, Yogyakarta, Januari 2012.







Urbanisasi Kelas Pekerja Tiongkok

Oleh: Eli Friedman



Tiongkok punya beberapa masalah, meski tidak terlepas dari rekor tiga puluh lima tahun pertumbuhan ekonomi, tapi masalahnya adalah pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ketergantungan negara tersebut terhadap ekspor dan pembangunan yang dipimpin oleh investasi telah mengakibatkan ketimpangan, rendahnya daya beli, investasi berlebih, hilangnya lahan subur, harga rumah yang selangit, dan bencana lingkungan yang tinggi. Hal ini membuat Tiongkok semakin rentan terhadap sejumlah krisis potensial: guncangan ekonomi eksternal, keruntuhan pasar perumahan, ketidakmampuan membayar hutang yang di gunakan untuk layanan publik dan kerusakan sosial.

Lalu, apa yang bisa menjamin stabilitas kapitalisme Tiongkok bagi generasi berikutnya?

Bagi negara, sebagian besar jawabannya adalah urbanisasi. Dalam Rencana Urbanisasi Nasional Baru yang baru dirilis (2014-2020), pemerintah pusat memerlukan lebih dari 100 juta orang untuk pindah ke kota pada tahun 2020, mendorong penduduk di perkotaan Tiongkok mencapai 60 persen. Rencana tersebut telah menetapkan tujuannya yang mengagumkan seperti perluasan

perumahan umum, pendidikan, dan layanan kesehatan, pengurangan emisi karbon dan kegiatan yang merusak lingkungan lainnya, dan pelestarian lahan pertanian.

Teori dari rencana tersebut adalah urbanisasi akan mendorong peralihan layanan sosial berbasis ekonomi mengurangi sumber dayanya yang intensif sehingga akses yang lebih baik terhadap layanan sosial akan memungkinkan bagi perluasan konsumsi domestik, dan bahwa pendidikan dan pelatihan di perkotaan akan menghasilkan peningkatan kapital-manusia, sehingga hal tersebut akan dapat mengurangi ketidaksetaraan. Inisiatif ini merupakan bagian dari paket reformasi yang bertujuan untuk "menyeimbangkan kembali" ekonomi Tiongkok.

Namun harapan negara tersebut bahwa urbanisasi akan mengarah pada bentuk kapitalisme yang lebih adil dan berkelanjutan kemungkinan tidak akan pernah terjadi. Pertama, meski semuanya berjalan sesuai rencana, masih akan ada warga kelas-dua dengan jumlah yang besar dan bergolak yang tidak diikutsertakan dalam pelayanan

sosial. Ini merupakan ancaman politik yang terus berlanjut.

Kedua, negara menganggap (dan harus menduga) bahwa solusi teknokratis untuk masalah yang ada adalah mungkin. Dengan mengesamping stabilitas politik, tidak mungkin rasa membayangkan bagaimana transisi yang mulus ke model akumulasi yang berbeda akan bisa terjadi. Bayangkan saja, misalnya, Keynesianisme abad kedua puluh tanpa gerakan buruh.

Partai Komunis ingin bisa menghasilkan dan memobilisasi tenaga kerja pada saat yang tepat ketika pasar membutuhkannya. Tapi tenaga kerja tidak akan pernah lepas dari sang pemiliknya; buruh, dan memindahkan orang sesuai dengan keinginan pasar dan negara pasti memerlukan pengusuran, perpecahan, dan gesekan sosial. Petani akan terus mengikuti jalan yang ditempuh dengan baik menuju kota-kota, namun fantasi para biopower teknokratis yang mutakhir akan tetap seperti sebuah fantasi.

"Proses Sejarah Alam"

Keyakinan pelopor Partai Komunis Tiongkok abad ke-20 pada progress dipamerkan secara penuh dalam proklamasi tentang urbanisasi. Sebagai pembukaan

untuk Rencana Urbanisasi Nasional Baru mereka menyatakan bahwa "urbanisasi adalah ... proses sejarah alami penduduk pedesaan yang akan terkonsentrasi di dalam kota. Ini adalah tendensi obyektif perkembangan manusia, dan ini adalah simbol penting bagi modernisasi nasional."

Bagi siapa saja yang telah melakukan perjalanan di kota-kota Beijing, Shanghai, atau Guangzhou, sepertinya Tiongkok telah menyelesaikan "proses sejarah alamnya." Kota-kota ini sangat terbebani skalanya yang besar, begitu padat dengan semua keajaiban dan kengerian kapitalisme kontemporer, bahwa proses urbanisasi telah melampaui sangat jauh imajinasinya sendiri.

Pada kenyataannya, bagaimanapun juga, Tiongkok adalah sebuah prodak dari urbanisasi. Negara ini memiliki 270 juta kaum migran pedesaan-ke-perkotaan, yang telah meninggalkan tempat tinggal mereka untuk bekerja di kota. Meskipun ini merupakan migrasi manusia terbesar dalam sejarah dunia, saat ini Tiongkok hanya memiliki lebih dari separuh penduduknya yang tinggal di kota-kota besar. Ini

adalah persentase yang lebih kecil dari penduduk kota di negara lain pada tingkat perkembangan ekonomi yang sama.

Hal Ini seharusnya tidak lah mengejutkan kebijakan negara ini sejak akhir 1950an telah dirancang khusus untuk mendemobilisasi tenaga kerja di pedesaan.

Alat yang paling penting dalam mengelola pergerakan manusia adalah *hukou*, atau sistem registrasi rumah tangga. *Hukou* adalah penghubung penyediaan layanan sosial, sehingga akses terhadap pendidikan, perumahan, perawatan kesehatan, dan pensiun bersubsidi, tidak akan dijamin jika seseorang meninggalkan kampung halaman mereka yang terdaftar secara resmi.

Transformasi kapitalis Tiongkok dilakukan di daerah perkotaan, yang berarti bahwa ratusan juta orang harus meninggalkan tempat pendaftaran *hukou* mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Mendapatkan *hukou* di daerah perkotaan adalah sesuatu yang mungkin, namun pemerintah kota sendiri menetapkan syarat bagi mereka yang ingin mendapatkannya. Hal ini telah menghasilkan rezim kependudukan yang bertingkat

secara spasial dimana kaum migran sering diserahkan sepenuhnya kepada kehendak pasar di wilayah di mana mereka bekerja.

Di bawah rencana baru tersebut, yang mereka sebut dengan "kota ekstra besar" dengan populasi lebih dari lima juta orang adalah untuk mempertahankan kontrol populasi yang ketat dengan terus membatasi akses terhadap *hukou* lokal. Kota-kota ekstra besar ini, bukan kebetulan, adalah yang paling dinamis secara ekonomi dan menawarkan layanan sosial terbaik. Rencana tersebut membayangkan sebagian besar penduduk kota yang baru menetap di kota-kota dengan ukuran kecil dan menengah yang miskin dalam segala bidang dengan populasi kurang dari satu juta orang.

Jadi, kita mendapatkan metode urbanisasi yang pertama: dengan melonggarkan persyaratan *hukou* di kota-kota dengan ukuran kecil dan menengah, harapannya adalah orang akan meninggalkan mimpi "*megacity*" mereka dan menetap di di kota yang ukurannya setara dengan kota Omaha, Albany, atau Boise. Mereka mungkin bukan tempat

yang paling *glamor*, tapi setidaknya lokasinya dekat dengan rumah. Yang paling penting, kaum migran pedesaan-ke-perkotaan di kota-kota ini akan memiliki waktu lebih mudah untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah, menikmati perumahan dan perawatan kesehatan bersubsidi, mengakses dana pinjaman dan berbagai macam keuntungan lainnya.

Bahkan jika kualitas layanan sosial ini jauh lebih rendah daripada apa yang dapat dinikmati oleh penduduk Beijing atau Shanghai, kemungkinan sistem yang lebih baik dari sistem layanan ini berada di luar sistem yang di sediakan negara. Dengan menggantung wortel yang penuh hak kewarganegaraan, pemerintah menggunakan pendekatan yang relatif lepas-tangan untuk memindahkan manusia ke tempat yang spesifik pada waktu yang spesifik pula.

Metode kedua urbanisasi adalah metode yang lebih terkendali, sedikit pemaksaan, dan dipenuhi kekerasan. Dalam kasus ini, pemerintah dengan sengaja memindahkan orang-orang dari tanah ke pemukiman yang direncanakan olehnya, dengan ciri-ciri jalan yang lebar secara komersil, deretan blok apartemen yang menjemukan dan berharga

murah, dan ruang publik (mungkin "ruang negara" akan menjadi istilah yang lebih baik) dengan penghinaan yang luar biasa terhadap kemanusiaan.

Perkembangan ini—beberapa di antaranya telah menjadi kota hantu, penuh dengan bangunan tapi tidak memiliki banyak penghuni—dibangun dari bawah ke atas dengan tujuan membuat orang keluar dari daerah pedesaan. Pendekatan yang khas adalah meminta para petani menyerahkan hak tanah mereka dengan imbalan sebuah apartemen gratis atau bersubsidi di kota yang baru.

Meski implementasinya tidak merata, perkembangan ini juga seharusnya dilengkapi dengan layanan sosial seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan transportasi umum. Negara membayangkan ini sebagai proses *win-win* dimana petani diselamatkan dari kehidupan pedesaan yang "bodoh" dan berubah menjadi konsumen perkotaan yang "cerdas", sambil membebaskan lahan di pedesaan yang kemudian dapat dikonsolidasikan untuk skala ekonomi yang lebih baik.

Proses urbanisasi yang disetujui secara resmi ditujukan untuk menarik "manusia bertalenta"

elit (istilah mereka) ke kota-kota yang elit. Meskipun kota-kota ekstra besar seharusnya mempertahankan kontrol populasi yang ketat, mereka didorong untuk membangun sistem kewarganegaraan berbasis tempat tinggal dimana *hukou* dapat diberikan secara terbatas.

Agar bisa mendapatkan skema ini, pemohon tidak boleh memiliki catatan kriminal, dan tidak dapat melanggar kebijakan pengendalian kelahiran (sering salah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "kebijakan satu anak"). Selain itu, mereka harus menyediakan bukti sewa, pembayaran asuransi sosial, dan kontrak kerja dari daerah mereka pada tahun-tahun sebelumnya.

Kesempatan untuk berhasilnya permohonan ini tergantung pada tingkat pendidikan mereka dan beberapa ketrampilan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan kapital lokal. lapangan pekerjaan di perusahaan milik negara atau sebagai pegawai negeri. Dan tidak ada salahnya untuk mengetahui bahwa hak-hak orang ini dan dengan bebasnya dihilangkan dari pemiliknya

Konsekuensi dari pendekatan multi-deret ini adalah untuk mencegah terjadi *overaccumulation* terhadap

penyediaan layanan sosial bagi rakyatnya. Dengan adanya asimetri yang mencolok antara mobilitas modal dan tenaga kerja di Tiongkok pasca-sosialis, negara telah mampu mewujudkan cita-cita yang tak pernah terbayangkan di sebagian besar negara. Tetapi bahkan dengan otoritas negara yang didedikasikan untuk proyek ini, tidak semua dari rencana ini berjalan sesuai rencana.

Struktur kelas baru

Masalah macam apa yang akan muncul dari urbanisasi Tiongkok? Ada dua kategori umum: yang terpenting dari perspektif ekuitas, dan hal-hal yang penting bagi negara dan kapital.

Sehubungan dengan yang pertama, masalah pertama adalah lebih dari 200 juta orang akan tetap berada di luar tempat pendaftaran *hukou* mereka. Pada tahun 2020, negara berharap untuk memiliki 60 persen penduduk yang tinggal di kota-kota besar, namun hanya 45 persen dari mereka yang tinggal permanen. Jika angka-angka ini sebenarnya direalisasikan, ini akan mengakibatkan sedikit penurunan atas "populasi

terapung." Tapi 200 juta orang tanpa jaminan akses terhadap layanan sosial hampir tidak terlalu penting.

Penawaran tanah-untuk-*hukou* telah menimbulkan masalah sosial yang utama, seperti yang selalu terjadi dalam proses akumulasi oleh kekerasan. Meskipun kebanyakan kaum migran tertarik untuk tinggal di daerah perkotaan, sedikit yang bersedia menyerahkan hak tanah mereka — salah satu dari sisa terakhir pencapaian ekonomi negara-sosialis.

Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa ada perlawanan besar ketika negara mencoba untuk meminta tanah dengan imbalan sebuah apartemen di sebuah kota yang suram dan ekonomi stagnan yang bermunculan dalam semalam. Sebenarnya, perlawanan atas perampasan lahan di Tiongkok mungkin merupakan sumber kerusakan sosial terbesar dalam beberapa tahun terakhir ini, dan dalam beberapa kasus telah menyebabkan konfrontasi dimana-mana. Agar pendekatan ini berjalan terus, negara harus terus menggunakan kekerasan dalam skala yang luar biasa.

Akumulasi oleh kekerasan bukan hanya fenomena yang terjadi di

pedesaan, karena daerah pesisir-kota juga berada di bawah ancaman bulldoser. Pemerintah telah mengumumkan akan menghabiskan 1 triliun yuan (\$ 160 miliar) untuk membangun- ulang kawasan kumuh. Jika pengalaman adalah panduan bagi masa depan, pembangunan- ulang ini sebenarnya terdiri dari pembongkaran paksa dan relokasi untuk memberi jalan bagi para spekulasi real estat. Kaum miskin kota akan didorong lebih jauh ke pinggiran kota, bahkan akan menambah kesulitan dalam pekerjaan dan kehidupan sosial mereka.

Rencana negara untuk menyalurkan orang ke kota-kota yang berukuran kecil dan menengah melalui relokasi sebagai persyaratan *hukou* tentu akan memiliki efek tertentu, dan bahkan dapat mendorong pertumbuhan. Tapi dua masalah yang mendasar tetap akan ada.

Yang pertama adalah bahwa sebagian besar kaum migran saat ini tinggal di kota-kota ekstra besar yang sekarang ditugaskan untuk membatasi pertumbuhan penduduk dengan ketat. Mereka datang ke kota-kota ini karena model akumulasi

kapital Tiongkok sangat menyukai daerah perkotaan, dan ini adalah tempat di mana mereka bisa menghasilkan cukup uang untuk bertahan hidup.

Negara ingin menggeser pertumbuhan dari kota-kota besar ini sehingga orang-orang dapat bertahan hidup di kota-kota yang lebih kecil namun penyesuaian ini tidak dapat dijalankan dalam satu malam. Akibatnya, puluhan juta orang akan terjebak di antaranya (kota besar tempat tinggalnya dan kota kecil tempat bekerjanya), mereka hanya akan mampu mengakses kewarganegaraan penuh di tempat-tempat yang tidak memiliki pekerjaan yang cukup. Dengan demikian, arus migrasi yang besar akan berlanjut di luar rencana.

Masalah kedua adalah bahwa negara sekarang berusaha untuk memperkuat sistem yang sudah muncul dimana kota-kota yang paling sulit mendapatkan akses terhadap layanan sosial adalah kota yang dimana pengeluaran layanan publiknya adalah yang paling besar. Seorang penduduk Beijing dapat mengandalkan sekolah dan rumah sakit terbaik dan pensiun, dan anak-anak mereka menikmati keuntungan besar karena dapat diterima di universitas setempat — yang, bukan kebetulan, adalah universitas terbaik di negara ini.

Penduduk non-lokal dengan kesempatan terbaik untuk mendapatkan akses terhadap layanan publik Beijing kaya, memiliki pendidikan yang tinggi, dan terhubung dengan baik— dengan kata lain, justru orang-orang yang paling membutuhkannya.

Para migran yang bekerja di pabrik atau lokasi konstruksi, sebagai pengasuh, pelayan, atau supir truk, tidak akan mengumpulkan cukup banyak poin untuk dianggap "manusia berbakat". Dari sudut pandang negara, tampaknya sangat masuk akal untuk menuntut orang menunjukkan bukti kontrak kerja, sewa, dan pembayaran asuransi sosial beberapa tahun kebelakang.

Tetapi persyaratan ini mengecualikan semua pekerja informal, mereka yang tinggal di perumahan informal atau menghadapi pembongkaran paksa, dan mereka yang bekerja di tempat di mana perusahaan tidak membayar asuransi sosial mereka — dengan kata lain, hampir semua kelas pekerja. Dan orang-orang yang terlahir diluar kebijakan pengendalian kelahiran — "anak surplus"— secara kategoris dikecualikan dari pertimbangan hak

kewarganegaraan.

Untuk mengatasi hal ini, penduduk di pedesaan mungkin akan membuat perhitungan bahwa mereka harus menetap di kota regional yang lebih kecil. Bahkan setelah mendapatkan *hukou* lokal, orang-orang urban yang baru dicetak ini akan mengirim anak-anak mereka ke sekolah yang lebih rendah dan mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih buruk dan pensiun yang lebih kecil.

Untuk masuk ke universitas elit di Beijing dan Shanghai, anak-anak mereka perlu mendapatkan nilai ujian masuk yang jauh lebih tinggi daripada anak-anak penduduk setempat. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan dapat memperoleh pekerjaan, dan jikapun mereka mendapatkannya, kemungkinan mereka akan dibayar lebih rendah. Implikasi untuk reproduksi kelas antargenerasi sangat jelas.

Apakah ini akan berhasil?

Bahkan jika seseorang bersedia menerima hierarki sosio-spasial yang tidak sama, ada keraguan yang nyata apakah pola urbanisasi ini dapat memecahkan masalah yang dikenali negara ini. Sejauh usaha mereka untuk mengurangi ketidaksetaraan, ada

kemungkinan yang agak jauh untuk mengatasi ketidaksetaraan regional. Pemerintah pusat telah mendistribusikan kembali dana ke daerah pedesaan dan bagian barat yang miskin selama lebih dari satu dekade sekarang, dan ada beberapa hasil penting.

Tapi tidak banyak yang menyarankan agar rencana urbanisasi akan melakukan apapun untuk mengatasi ketidaksetaraan kelas di tingkat nasional. Seperti yang disarankan di atas, sebenarnya cenderung diintensifkan.

Akankah rencana tersebut meningkatkan konsumsi dalam negeri? Mungkin, tapi implementasinya yang akan menentukan. Alasan orang Cina memiliki tingkat tabungan yang tinggi secara historis adalah bahwa mereka menghadapi masa depan yang sangat tidak pasti. Meskipun rencana tersebut meminta akses yang diperluas terhadap layanan publik, namun tidak bisa menjawab mengenai pertanyaan berapa banyak uang yang akan diberikan oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan ini. Mengingat bahwa sistem kesejahteraan sosial sebagian besar diserahkan ke tingkat kota,

pertanyaannya adalah apakah pemerintah daerah ini bersedia mendanai ekspansi besar untuk memasukkan kaum migran ke wilayahnya.

Akankah cakupan layanan kesehatan cukup memadai sehingga orang tidak selalu takut akan penyakit? Akankah pensiun cukup murah hati sehingga pekerja paruh baya tidak perlu khawatir mendukung orang tua mereka yang sudah tua? Di bidang spekulasi real estat yang merajalela, berapa banyak pendapatan orang yang harus dikhususkan untuk perumahan?

Ini adalah pertanyaan penting yang akan menentukan berapa banyak uang belanja yang dimiliki orang-orang urban baru. Dengan jumlah remeh yang telah dikhususkan untuk kesejahteraan sosial sejauh ini, ada banyak alasan untuk percaya bahwa orang akan terus menabung untuk menghadapi risiko di masa depan.

Terlebih lagi, ada kepentingan perkotaan yang penting dan kuat yang sangat diuntungkan dari upah rendah dan pasar real estat yang sedang booming. Sektor ekspor dan perusahaan konstruksi Tiongkok tak terbayangkan dalam bentuknya saat ini tanpa tekanan, pencurian, dan penghindaran pembayaran asuransi sosial.

Kelompok-kelompok kuat ini akan melakukan segalanya dalam kapasitas mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak harus membayar harga penuh untuk tenaga kerja.

Ada juga sedikit bukti bahwa usulan urbanisasi akan mengarah pada masa depan yang lebih berkelanjutan secara ekologis. Meskipun kota-kota di Tiongkok telah melakukan investasi terpuji dalam transportasi umum, pembelian mobil terus meroket dan telah melampaui tingkat konsumsi mobil di Amerika Serikat. Ada sedikit alasan untuk percaya bahwa kecenderungan pemerintah daerah untuk menarik modal — termasuk varietas beracun nya secara ekologis— akan berkurang oleh urbanisasi. Inovasi Ekonomi hijau yang mendorong dunia untuk bermimpi akan tetap berada dalam ranah fantasi untuk sebagian besar tempat.

Terlebih lagi, keinginan untuk meningkatkan konsumsi dan beralih ke mode akumulasi yang lebih ekologis secara fundamental bertentangan satu sama lain — bayangkan sebuah dunia di mana 1,4 miliar orang Tiongkok berbelanja seperti orang Amerika. Kemungkinan

pergeseran ciri-ciri tertentu dari krisis ekologis ke negara lain tetap ada, namun ini tidak memenuhi syarat sebagai solusi jangka panjang.

Akhirnya, nampaknya urbanisasi hanya akan meningkatkan kemungkinan kerusakan yang meluas. Pengabaian kota dan pedesaan akan terus menimbulkan perlawanan kekerasan. Menkonsentrasikan para migran di ghetto ekonomi yang stagnan bukanlah resep untuk memenangkan kesetiaan mereka. Dan para migran yang mendapatkan *hukou* perkotaan lebih dekat ke rumah mungkin merasa kecewa dengan pelayanan publik yang jauh lebih rendah daripada rekan di kota-kota besar. Sebuah "masyarakat yang harmonis" tetap sulit dipahami oleh Partai Komunis Tiongkok

Neoliberalisme bertemu Stalinisme

Inti dari kontradiksi ini adalah mobilitas modal di atas dan bertentangan dengan tenaga kerja. Asimetri ini, tentu saja, penting bagi ekspansi kapitalis secara global, namun tidak biasa perbedaannya begitu luas di negara tertentu (dan bila memang demikian, hal itu cenderung rasial seperti pada sistem apartheid Afrika Selatan atau Israel). Jadi,

kita mungkin membayangkan urbanisasi pasca-Sosialis sebagai sintesis aliran kapital neoliberal dan kontrol buruh ala Stalinis. Konsekuensinya adalah pertumbuhan eksplosif selama lebih dari satu generasi sementara jutaan kehidupan dan komunitas yang tak terhitung jumlahnya telah di bongkar.

hal Ini mengungkapkan kekurangan utama dalam pemikiran liberal, yang berpendapat bahwa buruh yang merdeka secara formal adalah dasar dari pertumbuhan ekonomi yang sehat. Memang, kaum liberal di Tiongkok kontemporer merindukan hari di mana hirarki formal sistem *hukou* dapat digantikan oleh kebebasan di pasar dan menginformasikan dominasi modal.

Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa bentuk kontrol dan hierarki pra-modern (atau negara-sosialis) tidak hanya sesuai, namun sebenarnya dapat memberikan kondusif bagi, ekspansi kapitalis. Jauh dari rongrongan bentuk ketidakadilan yang diwariskan dan berbasis status ini, kapital di Tiongkok telah memanfaatkan dan sangat diuntungkan dari hirarki sosio-

spasial sebelumnya.

Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa rezim kewarganegaraan yang berjenjang secara formal akan berkurang dalam relevansinya dalam jangka menengah sampai jangka panjang. Secara ekonomi, kapital telah menemukan bahwa dari hari kehari akan sulit untuk menemukan tenaga kerja. Pembatasan *hukou* membuat kaum migran tidak mungkin tinggal secara permanen di tempat-tempat di mana telah terjadi akumulasi modal yang paling banyak. Menghilangkan *a t a u m e n g u r a n g i* ketidaksempurnaan pasar ini akan diperlukan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja Tiongkok yang terus-menerus terjadi.

Secara politis, diskriminasi formal cenderung menimbulkan ketidakpuasan. Sebagai bentuk dominasi, itu terlalu kasar, terlalu jelas. Kita sekarang menyaksikan sebuah usaha oleh negara untuk menggunakan alat otoriternya untuk menstabilkan struktur kelas yang baru, yang sebelumnya tidak dapat dilegitimasi oleh kekuatan pasar yang tak terlihat namun sekarang dapat di tertibkan oleh sebuah gada yang bernama *hukou*.

Tidak banyak yang menyarankan bahwa negara pusat Tiongkok

memiliki kapasitas untuk mewujudkan bentuk kapitalisme yang lebih adil dan berkelanjutan yang diinginkannya. Visi urbanisasi negara ini selama enam tahun ke depan menunjukkan kekakuan struktur kelas dan kelanjutan atas kebijakan yang telah menyalurkan uang publik kepada elit. Bagian dari rencana yang mungkin menguntungkan orang-orang tanpa properti pasti akan menimbulkan perlawanan dari mereka yang memiliki kekuasaan. Dan kami tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka yang telah mendapat banyak keuntungan dari pengaturan yang ada akan dengan sukarela menyerahkan kontrol demi kelangsungan jangka panjang sistem ini

Pada akhirnya, mengatasi kepentingan yang mengakar *a k a n m e m b u t u h k a n* penggunaan kekuatan politik. Jika buruh-buruh di Tiongkok menginginkan hak atas kota, mereka harus merebutnya sendiri.

Judul Asli: The Urbanization of The Chinese Working Class.

Sumber: Jacobinmag.com 10 Maret 2014.

P e n g a l i h B a h a s a : Wisnuprimason

Terinjak di Kampung Kota:

Cerpen yang di tulis oleh individu bebas menceritakan bagaimana kegelisahan pemuda yang dihadapkan pada sebuah peristiwa yang tak pernah dia sangka sebelumnya.

Hak Atas Kota:

Di tulis oleh David Harvey yang bezrusaha mengurai apa hubungannya antara urbanisasi dan akumulasi kapital, menjadi penting untuk dibahas karena penggusuran, perampasan ruang hidup yang kita saksikan sehari-hari memiliki hubungan dengan proses urbanisasi dan proses akumulasi kapital.

Bangun Terus, Terus Bangun:

Penelitian singkat, ringkas dan padat yang dilakukan oleh Dekong yang berusaha memaparkan dampak apa yang di berikan oleh rezim pembangunan di dalam kota terhadap warga miskin kota di dalamnya, dengan studi kasus pembangunan hotel dan apartemen di Jogja, kegelisahan intelektual yang di lampiaskan Dekong pada penelitiannya adalah sebuah tamparan genit kepada semua intelektual menara gading.

Urbanisasi Kelas Pekerja Tiongkok:

Paparan singkat yang di lakukan oleh Eli Friedman mengenai urbanisasi luar biasa yang dilakukan Tiongkok dan tentu saja efek mengerikannya yang ditanggung oleh semua buruh, petani dan kaum miskin kota di Tiongkok di bawah panji Partai Komunis Tiongkok.

